



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**MENAKAR KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR: Kajian Non-Moneter Untuk Mengukur Tingkat
Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia**

Peneliti:

**Dra.Ec.Hj. Sri Kusreni, M.Si.
Achmad Sjafii, S.E.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 28

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006

- ECONOMIC DEVELOPMENT
- WELFARE ECONOMICS



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNPB UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**MENAKAR KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR: Kajian Non-Moneter Untuk Mengukur Tingkat
Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia**

Peneliti:

Dra.Ec.Hj. Sri Kusreni, M.Si.
Achmad Sjafii, S.E.

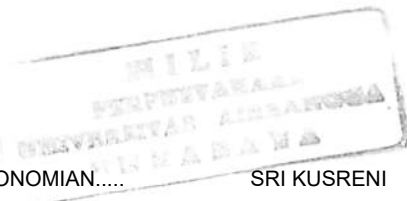
KKB
KK-2
LP 50/08
Kus
m

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 28

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60116 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : infolemlit@unair.ac.id – <http://lppm.unair.ac.id>

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

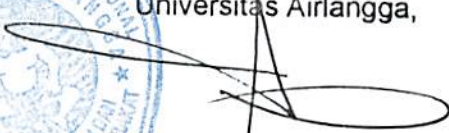
1	Judul peneliitian	:	Menakar Kinerja Perekonomian Kabupaten-Kota Di Jawa Timur: Kajian Non-Moneter Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia
	a. Macam penelitian	:	<input type="checkbox"/> Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
	b. Kategori penelitian	:	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III
2	Kepala proyek penelitian		
	a. Nama lengkap dg. Gelar	:	Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, MSi.
	b. Jenis kelamin	:	Perempuan
	c. Pangkat/Golongan/NIP	:	Penata Utama/III d/130 541 826
	d. Jabatan fungsional	:	Dosen Tetap/Lektor Kepala
	e. Fakultas / Puslit / Jurusan	:	Ekonomi/IESP
	f. Univ./ Inst./Akademi / Instansi	:	Universitas Airlangga
	g. Bid. Ilmu yang diteliti	:	Sosial/Ekonomi Sumberdaya Manusia
3	Jumlah tim peneliti	:	2 (dua) orang
4	Lokasi penelitian	:	Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
5	Kerjasama dengan Institusi Lain:		
	a. Nama Instansi	:	--
	b. Alamat	:	--
6	Jangka waktu penellitian	:	4 (empat) bulan
7	Biaya yang diperlukan	:	Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
8	Seminar Hasil Penelitian		
	a. Dilaksanakan tanggal	:	
	b. Hasil penelitian	:	<input type="checkbox"/> Baik sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang

Surabaya, Oktober 2006

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga,




Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN

Menakar Kinerja Perekonomian Kabupaten-Kota Di Jawa Timur: Kajian Non Moneter Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia

Sri Kusreni
Achmad Sjafii

Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga

2006

Disadari bahwa sejumlah persoalan serius dalam penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan telah menyebabkan ukuran ini menjadi kurang relevan bila digunakan pada saat ini. Maka muncullah indikator sosial ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan yakni indeks pembangunan manusia (IPM). Benarkah penggunaan pendekatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan lebih realistis dibandingkan pendekatan pendapatan per kapita? Apakah variabel pendidikan dan kesehatan relevan dimunculkan untuk lebih menampilkan keterwakilan tingkat kesejahteraan selain indikator pendapatan per kapita dalam suatu proses pembangunan, adalah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui berbagai indikator non-moneter lainnya sehingga lebih mengakomodasikan variabel yang lebih demokratis. Disamping itu juga untuk mengetahui indikator pembangunan yang lebih realistis dalam sebuah proses pembangunan.

Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data menggunakan data sekunder dengan jenis data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* (kabupaten/kota) dan *time series* (1990-2004). Unit analisis penelitian ini untuk seluruh variabel (independen dan dependen) adalah kabupaten/kota di Jawa Timur. Teknik analisis dan pengolahan data menggunakan regresi linier majemuk (*multiple linear regression*) yang diterapkan untuk data panel. Metode estimasi yang akan digunakan adalah *general*

least square (GLS) yakni transformasi dari metode OLS (*ordinary least square*) dengan satu per akar varians (*standard error*).

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi aspek ekonomi saja, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi dan satu dengan lainnya saling terkait. Dalam perjalanan waktu krisis ekonomi tahun 1997 berdampak pada pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini tercermin pada besaran IPM yang mengalami penurunan dari tahun 1996 (65,5) dibandingkan IPM pada tahun 1999 (61,8) atau telah terjadi kontraksi sebesar 5,65%.

IPM Jawa Timur untuk tahun 2002 sebesar 62,64 dibandingkan 61,80 untuk tahun 1999 atau terjadi peningkatan sebesar 1,36%. Namun, peningkatan tersebut belum dapat diikuti oleh beberapa daerah lainnya di mana besaran IPM-nya untuk tahun 2002 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 1999 yaitu Kabupaten Bondowoso, Kota Malang dan Kabupaten Pacitan.

Pembangunan manusia pada tahun 2002 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi pergeseran status pembangunan manusia dari menengah bawah ke menengah atas, yang terjadi di sembilan kabupaten/ kota yaitu kabupaten Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Trenggalek, Blitar, Jombang, Kota Probolinggo serta Kota Pasuruan.

Hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan angka harapan hidup cukup berkaitan erat. Pada umumnya bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik maka angka harapan hidup juga akan membaik atau semakin tinggi, dan sebaliknya. Dengan kata lain bila semakin tinggi angka harapan hidup maka hal ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin meningkat.

Model yang sesuai dengan studi ini adalah model *fixed effect*, setelah melalui tahapan uji. Seluruh variabel penelitian yakni indeks harapan hidup (LE), indeks pendidikan (Edu), pengeluaran pemerintah lokal untuk bidang SDM kesehatan dan pendidikan (G_{HE}), serta variabel boneka (D) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dibiayai oleh : DIPA Universitas Airlangga
Nomor S.K. Rektor : 4017/JO3/PP/2006, 2 Juni 2006

SUMMARY

Assessing The Economy Performace of Regent–Municipality in East Java: Non-Monetary Study to Measure The Wealth by Human Development Approach

**Sri Kusreni
Achmad Sjafii**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga**

2006

The serious problems with using per capita income as a measure indicator of development or wealth are well known. As a result, there are have been numerous efforts both to remedy its defect and to create other composite indicators that could serve as complements or alternative to this traditional measure. So that, the rising human development index (HDI) as a socioeconomic development in both developing and developed nations systematically and comprehensive. Does human development index more useful effectively to per capita income approach? Both of education and health are the important component that determinant in development process. So that, they are the component that composed the wealth condition in both developing and developed countries comprehensively.

The aims of this research are knowledgeable about the economy performance of regent–municipality in East Java by human development index (HDI). The second one, to identify the other non-monetary indicator (education and health) to be incorporated as the wealth condition on development of regions in East Java Province.

The secondary data is obtained from panel data are cross section (regent-municipality) and time series (1990-2004). The source of data from The Indonesia Human Development Report 2001; 2004 and each of The Statement of Regional Budget. The processing data use multiple linear regression for panel data. Estimation method used general least square (GLS).

The research find that health and education are the factors which affect growth of regent and municipality in East Java Province. So the health and education affect human capital of regent and municipality in East Java Province. So that, the human development and growth are closed relationship in development process.

The economic crisis caused sharp decreased severity of human development in general of regent and municipality. Its seen the HDI decreased by 65,5 (1996) to 61,8 (1999) or falling below 5,65%. But after economic crisis or recovery period, HDI in general of regent and municipality increase up to 1,36% by 61,80 (1999) to 62,64 (2002).

In terms of life expectancy , the people of "Tapal Kuda" region has lower life expectancy than to "Kulonon" region. Some regencies in Tapal Kuda region that belong to poorest life expectancy are Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, and Pasuruan. So that, relationship between socioeconomic progress and life expectancy are closed. The better socioeconomic the better life expectancy.

The fixed effect (FE) model is used in this research. All of the variable in this research i.e. health index (LE); education index (Edu); government expenditure for health and education (G_{HE}); and dummy variable (D) are influence significantly for regent and municipality economic growth.

KATA PENGANTAR

Dengan hanya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Yang maha Kuasa dan dengan atas perkenan-Nya laporan akhir "Menakar Kinerja Perekonomian Kabupaten-Kota Di Jawa Timur: Kajian Non-Moneter Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Dengan Pendekatan Pembangunan Manusia" akhirnya dapat terselesaikan.

Harapan kami semoga Laporan Akhir ini akan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta landasan berpijak bagi penyusunan program-program pembangunan agar senantiasa lebih mempertimbangkan peran pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta pelayanan sehingga studi ini terlaksana kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, Oktober 2006

Ketua Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Sistematika Tulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Penelitian Sebelumnya	6
2.2. Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Pembangunan Manusia	10
2.2.2 Unsur-Unsur Pembangunan Manusia	12
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
2.2.4 Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pemba- ngunan Ekonomi	17
2.2.5 Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	18
2.2.6 Studi Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan	21
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	23
3.1. Tujuan Penelitian	23
3.2. Manfaat Penelitian	23
BAB IV METODE PENELITIAN	24
4.1. Pendekatan	24
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian	24
4.3. Metode Pengumpulan Data	24
4.4. Definisi dan Pengukuran Peubah/variabel	25
4.5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data	26

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
5.1.	Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004	30
5.2.	Pembangunan Manusia di Jawa Timur	34
5.2.1	Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 1996-1999	35
5.2.2	Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 1999 - 2002	37
5.3.	Analisis Statistik Deskriptif	39
5.4	Estimasi Model dengan Data Panel	41
5.4.1	Hasil Estimasi Model dengan Metode OLS	41
5.4.2	Hasil Estimasi Model <i>Common</i> dengan Metode GLS	43
5.4.3	Model <i>Fixed Effects</i> (FE) atau <i>Random Effects</i> (RE)	44
5.5.	Hasil Estimasi Model Fixed Effect (EF) dan Uji Asumsi Klasik	44
5.6.	Solusi Terhadap Pelanggaran Asumsi Klasik	45
5.7.	Analisis Model Fixed Effects Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	46
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	49
6.1.	Kesimpulan	49
6.2.	Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 5.1	Kemajuan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Kriteria Indeks Pembangunan Manusia	35
Tabel 5.2	Sebaran Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Menurut Status Pembangunan Manusia Tahun 1996 – 1999	36
Tabel 5.3	Persebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Menurut Status Pembangunan Manusia Tahun 1999 – 2002	38
Tabel 5.4	Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian Tahun 1990 - 2004	39
Tabel 5.5	Hasil Estimasi dengan OLS Pooled (<i>Common No Weighting</i>)	42
Tabel 5.6	Hasil Estimasi dengan GLS Pooled (<i>Common No Weighting</i>)	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 5.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 1990-2004 (%)	31
Gambar 5.2	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 1993 – 2002	32

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	J u d u l
Lampiran 1	Data dan Variabel untuk Estimasi Model
Lampiran 2	Uji-Normal Residual Test Model Common-Tertimbang (GLS)
Lampiran 3-a	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1996
Lampiran 3-b	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan IKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004
Lampiran 3-c	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan IKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1996

BAB I PENDAHULUAN

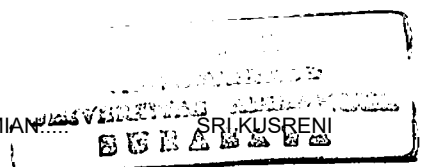
1.1. LATAR BELAKANG

Menurut ekonom Neo-klasik, kemajuan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari "kemampuan ekonomi"-nya yang sekaligus merupakan cermin dari tolok ukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), baik secara keseluruhan maupun per kapita.

Sebagai akibatnya, saat itu muncullah istilah "*negara maju*", "*negara berkembang*", dan "*negara terbelakang*". Perkins (2001:7) menyatakan: "*The more popular classifications implicitly put all countries on a continuum based on their degree development. Therefore, we speak of the distinctions between developed and underdeveloped countries, more and less-developed ones, or to recognize continuing change, developed and developing countries.... Developed countries frequently are called industrial countries....*"

Kategori negara-negara tersebut didasarkan atas klasifikasi pendapatan per kapita. Bank Dunia (IBRD) dalam Todaro (2004:41) membagi dunia menjadi 4 kategori negara berdasarkan pendapatan per kapita, yakni *low income countries* (kurang dari US \$ 755); *low middle income countries* (antara US \$ 756 – US \$ 2.995); *upper middle income countries* (antara US \$ 2.996 – US \$ 9.265); dan negara Organization for Economic Cooperation and Development/OECD (US \$ 9.266 atau lebih).

Di sisi lainnya, kemajuan pembangunan diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan peluang ekonomi yang pada akhirnya menumbuhkan kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Prinsip inilah yang lebih dikenal dengan "*trickle down efect*" (Todaro, 2000:14). Namun demikian, dalam kenyataannya persoalan-persoalan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan



ketimpangan distribusi pendapatan seringkali kurang mendapatkan perhatian bahkan terkesan dinomorduakan.

Disadari bahwa sejumlah persoalan serius dalam pengukuran yang menggunakan indikator pendapatan per kapita tersebut telah menyebabkan ukuran ini menjadi kurang relevan bila digunakan pada saat ini. Todaro (2000:69) menyebutkan: "*One of the measurement is used to comparative among different countries is per capita income. But the serious problems associated with using per capita income (GNP) as a measure of development are well known. Among the major objections to this measure are its failure to include nonmarketed (and therefore nonpriced) subsistence production, including much of women's work, and to incorporate welfare and income distribution considerations*".

Beberapa kelemahan lain tolok ukur tingkat kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan pendapatan per kapita. Diantaranya adalah adanya faktor non-ekonomi seperti adat istiadat (budaya), keadaan geografis, kebebasan berpendapat; komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan nasional; kesulitan menilai kembali mata uang negara yang bersangkutan ke dalam mata uang dolar (sebagai satuan hitung pendapatan per kapita secara internasional); penggunaan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) oleh suatu negara; serta kelemahan metodologis dan statistik dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar golongan masyarakat (Sukirno, 1985: 51-59).

Dengan kata lain, indikator keberhasilan pembangunan atau tepatnya ukuran kesejahteraan suatu bangsa tidak lagi melulu ditentukan dari tinggi rendahnya PDB atau pendapatan per kapita. Saat ini indikator non-moneter (*Modified non-monetary indicators*) telah turut diperhitungkan, seperti tingkat pendidikan, dan kesehatan. Morris (1996) dalam Todaro (2000: 90) menyebutkan bahwa indikator yang turut diperhitungkan faktor-faktor non-moneter dikatakan sebagai *Physical Quality of Life Index* (PQLI). PQLI menggunakan variabel tingkat harapan hidup (*expectation of life*), tingkat kematian bayi (*infant mortality rate*), dan tingkat melek huruf (*literacy rate*). Dari ketiga variabel ini lalu membentuk indeks gabungan yang disebut PQLI.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang cukup populer saat ini dan turut memperhitungkan indikator sosial mendampingi pendapatan per kapita tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indikator IPM yang pertama kali muncul pada awal '90-an ini memperhitungkan tiga kriteria atau hasil akhir pembangunan, yakni ketahanan hidup (*longevity*) yang diukur berdasarkan harapan hidup pada saat kelahiran; pengetahuan (*educational*) yang dihitung berdasarkan rata-rata melek huruf di kalangan orang dewasa dan angka rata-rata masa sekolah; serta kualitas standar hidup (*standard of living*) berdasarkan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Todaro, 2003:68).

Pada tingkat regional hal sama juga terjadi pada Propinsi Jawa Barat (pendapatan per kapita sebesar Rp 592.000,-) dan Propinsi Kalimantan Timur (pendapatan per kapita sebesar Rp 591.600,-) pada tahun 2002. Namun Propinsi Kalimantan Timur mempunyai indeks 70,0 menempati peringkat keempat diantara 30 propinsi di Indonesia. Sedangkan Propinsi Jawa Barat justru menempati peringkat ketujuhbelas dengan indeks 65,8.

Dari keadaan inilah disadari bahwa hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi semata-mata tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial lainnya dikhawatirkan pembangunan tersebut tidaklah bermakna. Beberapa kasus di negara penghasil minyak yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, disebut-sebut sebagai negara yang mengalami "pertumbuhan tanpa pembangunan" (Todaro, 2003:70). Keadaan ini diperkuat oleh indikator pendidikan dan kesehatan di beberapa negara tersebut perkembangannya tidaklah secepat indikator ekonominya bahkan terkesan terabaikan.

Uraian di atas memberikan penegasan dan bukti bahwa indikator tingkat kesejahteraan, dalam hal ini adalah pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi telah banyak menyimpan berbagai kelemahan seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan munculnya indikator tingkat kesejahteraan yang diluncurkan pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada awal '90-an, maka cermin kesejahteraan tidak lagi diwakili semata-mata oleh variabel ekonomi (pendapatan per kapita) saja. Namun keterwakilan variabel pendidikan

seperti melek huruf, lama sekolah dan variabel kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi juga akan turut dipertimbangkan.

Dengan memperhatikan kasus global (antar negara) dan nasional (antar provinsi) yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin menganalogikan Provinsi Jawa Timur sebagai topik penelitian untuk mengungkapkan tingkat kesejahteraan diantara kabupaten dan kota dengan pendekatan pembangunan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

1. **Seberapa besar variabel pendidikan mempengaruhi kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur?**
2. **Seberapa besar variabel kesehatan mempengaruhi kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur?**
3. **Seberapa besar variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam mempengaruhi kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur?**

1.3. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dirangkai dalam enam bab yang merupakan satu kesatuan dengan rincian sebagai berikut :

Bab I menguraikan secara ringkas tentang latar belakang permasalahan, dan rumusan masalah yang dikemukakan serta sistematika penulisan.

Bab II mencoba mengetengahkan tentang landasan teoritik yang mendukung pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV; beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai tokoh yang berkompeten; serta dilengkapi dengan beberapa komparasi indikator keberhasilan pembangunan serta yang telah dipergunakan dalam beberapa dasawarsa sebelum pada akhirnya UNDP memperkenalkan indikator Indeks Pembangunan Manusia pada dekade '90-an.

Bab III memaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian bagi perkembangan khasanah ilmu dan pentingnya untuk proses pengambilan

kebijakan bagi kalangan yang membutuhkan pada umumnya dan peneliti pada khususnya.

Bab IV akan membahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan sumber data dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang teknik dan metode analisis data.

Bab V Selanjutnya membahas dan menganalisis penerapan indikator IPM sebagai indikator tingkat kesejahteraan diantara kota maupun kabupaten di Jawa Timur dan akan dilanjutkan dengan implikasi-implikasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Akhirnya seluruh tulisan ini akan ditutup dengan Bab VI yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis tentang kondisi pembangunan manusia khususnya di Provinsi Jawa Timur yang didasarkan data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya Tentang Indikator Kesejahteraan

Penelitian yang telah dilakukan Usher (1963) telah menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan di antara Inggris dan Thailand adalah lebih kecil daripada yang ditunjukkan oleh perbandingan pendapatan per kapita mereka. Menurut perbandingan pendapatan per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk di Inggris adalah sebesar tiga belas kali lipat daripada yang dicapai penduduk di Thailand. Akan tetapi, setelah membuat perhitungan kembali dalam nilai produksi nasional mereka dengan terlebih dahulu memperbaiki kelemahan-kelemahan cara penghitungan pendapatan nasional yang dilakukan, Usher berkesimpulan bahwa taraf hidup penduduk Inggris hanyalah tiga kali sebesar yang dicapai di Thailand.

Menurut Kindleberger (1963) dalam Sukimo (1985) menyebutkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan Milikan di Asia di luar Timur Tengah; demikian pula penelitian Gilbert dan Kravis telah membuktikan bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya terdapat diantara berbagai negara di Eropa di satu pihak dan Amerika Serikat di lain pihak adalah lebih kecil daripada perbedaan yang ditunjukkan oleh perbandingan tingkat pendapatan per kapita mereka.

Pada prinsipnya apa yang telah dinyatakan oleh para peneliti-peneliti tersebut di atas menyoroti berbagai aktivitas yang tidak terdeteksi dalam transaksi di pasar, yang pada akhirnya luput dari penghitungan pendapatan nasional. Hal inilah yang menyebabkan penaksiran yang salah atau lebih tepatnya penaksir yang terlalu rendah (*under estimate*). Beberapa jenis aktivitas yang dimaksudkan adalah hasil produksi pertanian subsisten yang dikonsumsi sendiri (tidak memiliki harga dalam satuan uang) sehingga tidak tercatat dalam penghitungan pendapatan nasional. Padahal nilai hasil kegiatan pertanian ini merupakan sumbangan terbesar dalam perekonomian negara-negara berkembang.

Disamping itu kesulitan dalam menukar nilai pendapatan per kapita dalam mata uang negara yang bersangkutan ke dalam mata uang dolar adalah salah satu kelemahan lainnya dari pendekatan pendapatan per kapita. Hal ini dikarenakan penggunaan nilai tukar resmi di antara mata uang tersebut dengan dolar Amerika Serikat (US\$). Akibatnya perbandingan nilai mata uang tersebut tidaklah mencerminkan kondisi sesungguhnya jika perbandingan tersebut adalah berupa barang atau jasa pada masing-masing negara.

Akibat berbagai kesulitan yang dialami dalam penggunaan konsep PDB per kapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan atau keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau wilayah, maka upaya mencari indikator-indikator lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap atau bahkan pengganti ukuran tradisional tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh Bastor (1972); Hicks dan Streeten (1979) dalam Todaro (2000) dikatakan bahwa pada dasarnya berbagai indikator alternatif tersebut dikategorikan dalam dua kelompok besar, yakni mengukur pembangunan berdasarkan pola interaksi "normal" dan "optimal" antara berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik, serta di sisi lainnya yang mencoba mengukur pembangunan dalam kerangka kualitas hidup.

Hasil penelitian sejenis juga dilakukan oleh *United Nations Research Institute on Social Development* (UNRISD) pada era '70-an. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk memilih indikator-indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan, sekaligus untuk menganalisis hubungan antara berbagai indikator tersebut pada berbagai tingkat kemajuan pembangunan. Indikator tersebut kemudian dikenal dengan *Social Development Index* (SDI) dengan menggunakan 73 indikator. Kemudian indikator tersebut berubah menjadi 13 indikator utama yang terdiri dari 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi.¹

Hasil temuan dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa korelasi indeks pembangunan sosial tersebut lebih tinggi daripada korelasi PDB per kapita untuk kasus negara-negara maju daripada negara-negara berkembang. Dengan kata lain, pembangunan sosial di negara-negara berkembang sebenarnya berlangsung lebih cepat dan berhasil mencapai lebih banyak kemajuan daripada pembangunan ekonomi hingga mencapai nilai pendapatan per kapita US\$ 500 (berdasarkan harga-harga yang berlaku di tahun 1960).

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan William Nordhaus dan James Tobin (1972) dalam Arsyad (1992) berupaya untuk menyempurnakan nilai-nilai PDB dalam rangka memperoleh suatu indikator ekonomi yang lebih baik yakni dengan menggunakan konsep *Net Economic Welfare* (NEW). Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan dua cara yakni (a) *korelasi positif*, berkaitan dengan pemanfaatan waktu senggang (*leisure*) dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang dapat dipergunakan untuk berekreasi demi kepuasan batin yang harus diperhitungkan. Koreksi ini harus ditambahkan pada PDB yang nantinya akan

¹ Seluruh indikator tersebut dapat dibaca pada Appendix 2.1. Table A2.1. Todaro. 2000. *Economic Development. Seventh Edition*, Addison-Wesley. New York. p.70.

menghasilkan NEW. Demikian juga dengan kegiatan ekonomi informal yang seringkali luput dari perhitungan PDB.

(b) *korelasi negatif*, berkaitan dengan biaya yang ditimbulkan oleh adanya kerusakan lingkungan, polusi udara, dan sebagainya yang merugikan masyarakat sekitar. Biaya tersebut belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar yang seharusnya dikurangkan dari nilai PDB untuk mendapatkan NEW. Jelas kiranya perekonomian seyogyanya mengarah pada tujuan yang lebih luas, seperti keseimbangan antara waktu kerja dan waktu senggang, atau pemanfaatan sumber daya secara lebih baik agar pencemaran lingkungan dapat dihindari.

Studi yang pernah dilakukan oleh Irma Adelman dan Cinthia Morris "*Society, Politics, and Economic Development*" (1967) di sejumlah 74 negara berkembang menyoroti keterkaitan antara variabel ekonomi dan nonekonomi. Kedua peneliti ini berupaya mencari tolok ukur pembangunan alternatif yang terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik berdasarkan 40 variabel.² Secara ringkas studi tersebut telah menemukan sejumlah hubungan yang sangat erat antara berbagai variabel tersebut dengan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi. Demikian pula hal serupa diungkapkan oleh Offer (2000) bahwa pengukuran kesejahteraan hendaknya turut melibatkan indikator sosial dan tidak dapat diukur semata dengan produksi per kapita Pitchford (1974) dalam Djadjanegara dan Ananta (1986).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, maka Morris D. Morris (1979) dalam Todaro (2000) merumuskan sebuah indeks gabungan baru yakni *Physical Quality of Life Index (PQLI)* atau Indeks Mutu Hidup (IMH). Dengan menggunakan tiga indikator: *life expectancy at age 1*, *infant mortality*, dan *literacy rate* maka kinerja setiap negara diperingkatkan pada skala antara satu (buruk) hingga seratus (baik). Dari studi ini diperoleh temuan bahwa terdapat sejumlah negara yang memiliki PDB per kapita tinggi ternyata memiliki PQLI yang sangat rendah (kasus negara Arab Saudi dan Qatar), bahkan lebih kecil daripada rata-rata PQLI yang dimiliki negara-negara yang paling miskin sekalipun.

Sebaliknya, pada sejumlah negara yang memiliki PDB per kapita demikian rendah justru memiliki PQLI yang cukup dibandingkan rata-rata skor yang dimiliki negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (kasus negara RRC dan Sri Lanka). Pendek kata, dari temuan di atas menunjukkan situasi bahwa perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan dalam kualitas hidup dasar sebelum terjadinya

² Seluruh indikator tersebut dapat dibaca pada Appendix 2.1. Table A2.2. Todaro. 2000. *Economic Development. Seventh Edition*, Addison-Wesley. New York. p.71

kenaikan PDB per kapita, atau sebaliknya kenaikan PDB per kapita tidaklah menjamin terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.

Hasil penelitian dari Sayogyo dan Abustam (1984) dalam Singarimbun (1996) disebutkan bahwa ketika IMH ditambah dengan satu unsur lagi yakni *Total Fertility Rate (TFR)* selanjutnya disebut dengan IMH-Plus berunsur empat, maka didapatkan perbedaan peta kesejahteraan yang cukup berbeda dari IMH. Terdapat lima propinsi yakni Jawa Timur, Jogjakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan yang mempunyai TFR terendah, ternyata menunjukkan bahwa semakin rendah TFR semakin besar IMH-Plus jika dibandingkan IMH. Sebaliknya propinsi dengan TFR lebih tinggi IMH-Plus lebih rendah dari IMH. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan keluarga berencana (KB) mampu menyumbangkan terhadap perbaikan indeks mutu hidup berunsur empat (IMH-Plus).

Adapun penelitian Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000) tentang penentuan skala prioritas untuk pembangunan yang berwawasan kependudukan, telah mengungkapkan bahwa kualitas hidup masyarakat haruslah ditinjau dari berbagai aspek (multidimensi). Aspek tersebut kemudian lebih terkenal dengan nama "Indikator Kependudukan Strategis" yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, aktivitas ekonomi, sarana ekonomi, dan karakteristik/program keluarga berencana (KB) berdasarkan jenis kelamin (gender).

Berdasarkan keenam indikator tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan propinsi yang menempati peringkat "baik" terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Peringkat "kurang" banyak ditempati oleh propinsi di belahan Indonesia bagian Timur. Di tingkat kota, yang menempati peringkat "baik" terdapat di DKI Jakarta, sedangkan di tingkat kabupaten, banyak ditempati oleh kabupaten di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Upaya mencari indikator tingkat kesejahteraan lebih komprehensif yang paling terkini telah dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. UNDP telah merumuskan tingkat keberhasilan pembangunan berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga variabel utama, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yakni *life expectancy at birth for a long and lengthy life, aducational attainment in terms of adult literacy rate and combined gross enrollment ratio at primary, secondary and tertiary level and GDP per capita (purchasing power parity \$) for a decent standard of living* (Jahan, 2000).

Beberapa temuan di sejumlah negara dengan tingkat kesejahteraan yang cukup unik, yakni tingkat PDB per kapita yang kurang lebih sama, namun memiliki

skor indeks pembangunan manusia yang sangat berbeda. Kasus terjadi pada negara Pakistan dan Nikaragua yang memiliki PDB per kapita yang sama pada tahun 1992. Namun HDI negara Nikaragua 50 persen lebih tinggi daripada negara Pakistan. Demikian juga hal ini terjadi pada Negara Yordania dan El Salvador, maupun pada Negara Chili dan Negara Irak.

Disisi lainnya terlihat bahwa ada keterkaitan secara positif antara pengeluaran pemerintah terhadap fasilitas sosial khususnya pendidikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Demikian sebaliknya tingkat investasi dan distribusi pendapatan akan mempengaruhi hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian Ramirez, Raniz, dan Stewart (1998), data statistik di sejumlah negara selama tahun 1970 hingga 1992 menunjukkan hubungan yang erat antar variabel-variabel tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling mempengaruhi di satu sisi (Lee, 2005). Sedangkan keterkaitan antara dua variabel tersebut turut dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk prasarana sosial khususnya pada bidang pendidikan di lain sisi. Menurut Baroo dan Lee (1993, 1994) dalam Ranis dan Stewart (1999) pada akhirnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tersebut pada akhirnya akan dapat berpengaruh secara positif pada pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia oleh UNDP (Human Development Report, 1990) dalam *Indonesia Human Development Report* (2001:10) disebutkan bahwa *human development as a process of people to have wider choice enabling. Income is one of those choice, but it is not the total of human life. Health, education, a good physical environment and freedom of action and expression are just as important.* Hal juga dikuatkan dalam *Indonesia Human Development Report* (2004: 70) bahwa *human development concerns more than the formation of human capabilities, such as improved health and knowledge. It also concerns the use people make of their acquired capabilities – for leisure, productive purpose, or being active in culture, social and political affair. Human development has to balance these concern.*

The "human development" approach together the production and distribution of commodities and the expansion as well as the use of human capabilities. It analysis all issues in society – whether economic growth, trade, employment, political

freedom or cultural value – from the perspective of people. It also encompasses the critical issue of gender. Human development is thus not merely the concern of the social sector. It is a comprehensive approach to all sector (UNDP, 2004:71).

Ranis dan Stewart menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah *the improvement of the human condition so that people live longer, healthier and fuller lives.... Human development were related to poeples physical well-being, such as health, nutrition and education; and others to the widening of choise and enhanced empowerment, including participation, political freedoms and cultural aspects.* Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Bank Dunia melalui *World Development Report (1991)* dalam Todaro (2003) bahwa pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya merupakan tantangan utama pembangunan.

Berbeda dengan pendekatan maupun model-model pembangunan lainnya yang pernah digunakan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh UNDP disebutkan bahwa *“economic growth model” deal with expanding the GNP rather than with enhancing the quality of human lives. Human resources development treats human beings primarily as inputs in the production process – as means rather than as ends. The “welfare approach” look at human beings as beneficiaries and not as agents of change in the development process. Finally, the “basic needs approach” focuses on providing material good and services to deprived population group rather than on enlarging human choice in all fields.*

But the “human development approach” brings together the production and distribution of commodities and the expantions as well as the use of human capabilities. It analyses all issues in society – whether economic growth, trade, employment, political freedom or cultural values – from the perspective of people. It also encompasses the critical issue of gender. Human development is thus not merely the concern of the social sector. It is a comprehensive approach to all sectors (UNDP, 2004:70-71).

Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dikatakan Todaro (2003:21) pada hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman

kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk menuju pada suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Menurut pendekatan "Kapabilitas" dari Amartya Sen bahwa "capability to function" adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Diungkapkan Sen (1985, 1999) dalam Todaro (2003) bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati. Kemiskinan tidak dapat diukur dengan tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional. Yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bukan hanya karakteristik komoditi yang dikonsumsi (seperti dalam pendekatan utilitas), tetapi manfaat apa yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditi tersebut.

Pada dasarnya untuk dapat memahami konsep kesejahteraan manusia secara umum dan kemiskinan secara khusus, selayaknya penekanannya lebih dari sekedar ketersediaan komoditi dan memperhatikan kegunaannya. Apa yang disebut Sen (1999) dalam Todaro (2003) bahwa "fungsi" tidak lain adalah apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap suatu komoditi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki atau dikendalikan oleh seseorang (atau apa yang sebenarnya dapat dilakukan seseorang dengan komoditas tersebut). Kebebasan memilih yang dimiliki seseorang terhadap hidupnya sendiri, adalah aspek utama dalam memahami kesejahteraan secara mendalam.

2.2.2. Unsur-Unsur Pembangunan Manusia

Untuk memahami kondisi pembangunan tersebut, Goulet (1972) dalam Todaro (2004) dan Thirlwall (1999) mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga unsur dasar harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis, yakni :

- (a) **Kecukupan (*sustenance*)**: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Apa yang disebut sebagai kebutuhan dasar adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan seseorang ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau tidak mencukupi, maka akan memunculkan kondisi "keterbelakangan absolut".

Dengan demikian keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Sehingga kenaikan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan absolut, perluasan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, merupakan hal-hal yang harus ada (*necessary conditions*) bagi pembangunan, tapi hal-hal itu saja belum cukup (*not sufficient conditions*).

Dinyatakan oleh Amartya Sen dalam Human Development Report (1994) dalam Todaro (2004) bahwa pondasi nyata bagi pembangunan manusia adalah universalisme dalam pengakuan atas hidup setiap manusia termasuk didalamnya adalah kekayaannya. Namun jika semua perhatian dicurahkan ke hal itu (kekayaan) maka hal itu adalah suatu kekeliruan. Hal ini disebabkan: *pertama*, kumulasi kekayaan tidak menjamin tersedianya atau terpenuhinya pilihan-pilihan yang terpenting bagi manusia. *Kedua*, Pilihan-pilihan manusia itu sendiri jauh lebih luas dari sekedar kesejahteraan ekonomi.

(b) Harga diri (*self-esteem*): Menjadi manusia seutuhnya.

Dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu merupakan hakekat dari jati diri, pengakuan atau harga diri seseorang. Menurut Goulet (1972:89-90) menyatakan bahwa seandainya penghargaan terhadap diri (negara berkembang) tidak hanya dinilai atau didasarkan pada prestasi-prestasi material, maka mereka pasti tidak merasa miskin atau sengsara, terlepas dari seperti apa kondisi ekonomi mereka. Sebaliknya, jika kesejahteraan ekonomi terlanjur diyakini sebagai syarat mutlak untuk mencapai kehidupan yang serba lebih baik, maka mereka yang "terbelakang" selamanya akan merasa sengsara dan tidak berharga.

Seringkali kemakmuran material dianggap sebagai suatu ukuran kelayakan universal dan dinobatkan menjadi landasan penilaian atas segala sesuatu, bahkan dianggap sebagai berhala baru (Todaro: 2004:26). Gencarnya serbuan nilai-nilai Barat yang mengagungkan material telah mengikis jati diri atau harga diri masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Tidak sedikit secara tiba-tiba merasa dirinya kecil atau tidak berarti hanya karena mereka tidak memiliki kemajuan ekonomi dan teknologi setinggi bangsa-bangsa lain.

(c) Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba: Kemampuan untuk memilih.

Todaro (2004:27) menyatakan bahwa kebebasan hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk tidak diperbudak oleh target material. Kebebasan ini juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang sifatnya dogmatis. Bila memiliki kebebasan hal ini berarti manusia mampu berfikir jernih dan menilai sesuatu atas dasar keyakinan, pikiran sehat, dan hati nuraninya sendiri. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Arthur Lewis (1963) dalam Todaro (2004) menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi

dan kebebasan dari sikap menghamba: "buah terbesar yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi bukanlah kekayaan menambah kebahagiaan, melainkan menambah pilihan".

2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada prinsipnya IPM maupun PQLI melakukan pemeringkatan semua negara berdasarkan tiga kriteria atau akhir pembangunan. IPM sendiri merupakan *a composite index based on three indicators: longevity, as measured by life expectancy at birth; educational attainment, as measured by a combination of adult literacy and mean years of schooling and standard of living, as measured by per capita expenditure (purchasing power parity Rupiah). The index value is between 0 and 100*" (UNDP, 2004:204).

IPM mencoba untuk memeringkat semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Pemeringkatan tersebut berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan: *masa hidup (longevity)* yang diukur dengan usia harapan hidup, *pengetahuan (knowledge)* yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga), serta *standar kehidupan (standard of living)* yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity* atau PPP) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marginal yang semakin menurun dari pendapatan (Todaro, 2004: 68).

2.2.3.1. Komponen Inti Paradigma Pembangunan Manusia

Seperti yang dijabarkan pada *Human Development Report (1995:12)* dalam *Indonesia Human Development Report (2001:65)* bahwasannya paradigma yang digunakan dalam menyusun pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

- [a] *productivity*, masyarakat hendaknya dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitasnya dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses peningkatan pendapatan dan pekerjaan yang memberikan keuntungan.
- [b] *equity*, masyarakat hendaknya memiliki kesempatan akses secara merata.
- [c] *sustainability*, akses terhadap berbagai kesempatan harus terjamin bukan hanya bagi generasi saat ini namun juga bagi generasi yang akan datang.

[d] *empowerment*, pembangunan hendaknya dilaksanakan oleh dan diperuntukkan bagi masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan manusia memerlukan dukungan dari berbagai pihak pelaku pembangunan. Disamping itu pembangunan manusia tidak mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan boleh dikatakan terdapat hubungan, meskipun secara tidak langsung antara peningkatan pendapatan dan kemajuan pembangunan manusia itu sendiri. Demikian pula peranan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah turut berperan dalam peningkatan pembangunan manusia.

Diuraikan dalam UNDP (2004:71) bahwa *"human development goes beyond economic growth, but it is not anti-growth. From a human development perspective, economic growth is not an end in itself. Rather is a means to an end – enlarging people's choice. There is, however, no automatic link between income growth and human progress. In the short run, even in the absence of satisfactory economic growth, countries can achieve significant improvements in human development through well-structured public expenditure..... In the long run, no sustained improvement is possible without growth"*.

2.2.3.2. Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu keuntungan terbesar dari penggunaan IPM adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara atau wilayah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang relatif rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif kecil dalam pembangunan manusianya. Lebih dari itu, IPM juga dapat menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain. Paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya semata-mata dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus seperti halnya negara-negara penghasil minyak yang memiliki pendapatan tinggi, disebut sebagai negara yang mengalami "pertumbuhan tanpa pembangunan". Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang

tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendidikan saja. Kiranya IPM merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur indikator tersebut.

Salah satu inovasi besar dalam IPM selama beberapa tahun terakhir ini adalah pemecahan IPM keseluruhan suatu negara atau wilayah menjadi beberapa komponen terpisah untuk membedakan antara pria dan wanita, kelas sosial berbeda yang mencerminkan distribusi pendapatan, serta wilayah dan kelompok masyarakat yang berbeda. IPM juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai komponen-komponen yang penting bagi penyusunan pembangunan. Dengan mengkombinasikan data sosial dan ekonomi, IPM membuat banyak negara maupun wilayah menerapkan ukuran yang lebih luas dalam kinerja pembangunannya, baik secara relatif maupun absolut. Keadaan ini diperlukan untuk memfokuskan kebijakan ekonomi dan sosialnya secara lebih langsung ke dalam berbagai bidang yang membutuhkan perbaikan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah maka misi pengembangan perencanaan pembangunan manusia (*human development planning*) telah menempati posisi yang cukup strategis. Menurut Sumahdumin dan Abdurahim (2000) misi ini merupakan upaya melakukan reorientasi pembangunan daerah ke arah yang sejalan dengan paradigma pembangunan manusia. Reorientasi dimaksud akan lebih bermakna kalau dimulai pada tahap paling awal dari proses pembangunan, yaitu tahapan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Dalam konteks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi memang diperlukan karena merupakan dasar bagi pembangunan manusia. Namun demikian, karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis meningkatkan pembangunan manusia, maka diperlukan intervensi pemerintah yang tepat agar keduanya dapat sejalan. Fokus pembangunan perlu lebih memperhatikan sektor sosial, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial dasar lainnya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial akibat kebijakan yang lebih condong (bias) pada pertumbuhan ekonomi.

Meskipun terdapat beberapa kritik yang dilontarkan, namun sulit disangkal bahwa ketika IPM digunakan secara bersama-sama dengan ukuran pembangunan ekonomi yang tradisional, maka akan semakin meningkatkan pemahaman kita tentang wilayah-wilayah mana yang benar-benar berhasil membangun dan mana yang tidak. Menurut Todaro (2004: 72-74) lebih penting lagi, dengan mengkaji masing-masing ketiga komponen atau variabel IPM, akan didapatkan gambaran distribusi pendapatan, ketimpangan gender antar kawasan. Dari IPM ini pula

akhirnya dapat diidentifikasi suatu negara benar-benar melakukan pembangunan atau tidak, namun dapat dicermati kelompok mana saja di dalam suatu negara atau wilayah yang berpartisipasi di dalam pembangunan tersebut.

2.2.4. Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Ekonomi

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Lebih dari itu, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Sementara itu keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Karenanya, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan merupakan input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2004:404).

Adanya pemikiran yang menyatakan bahwa perluasan pendidikan senantiasa mendukung bahkan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Psacharopoulos (1972) dalam Todaro (2000) membuktikan bahwa pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Bahwasanya tersedianya tenaga-tenaga kerja terampil dan terdidik sebagai syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan sama sekali tidak perlu diragukan.

Peningkatan kesehatan, pendidikan dan nutrisi bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan "modal manusia"³ di masa yang akan datang. Peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Disamping itu pendidikan bagi kaum wanita dalam rangka peningkatan kualitas hidup sangat penting untuk melahirkan generasi yang akan datang. Pendek kata "pembangunan manusia" telah memberikan sumbangan terbesar bagi pencapaian "*sustainability*". (Anand and Sen, 2000: 2038).

³ Menurut Perkin (2001: 226), "human capital" as the value of learning and experience embodied in workers, which, like made capital, increasing productivity and income.

Dalam kaitannya dengan pembangunan di bidang pertanian yang merupakan sektor terbesar penyumbang PDB di kebanyakan di negara berkembang, maka diperlukan sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan di sektor tersebut. Menurut Philip dan Manzoor (1974) dalam Todaro (2004) diperlukan pengelompokan kebutuhan pendidikan ke dalam empat kategori utama, yakni:

1. Pendidikan umum atau dasar (untuk menciptakan kemampuan baca-tulis, hitung-menghitung, pemahaman atas ilmu pengetahuan dasar dan kondisi dilingkungan sekitar);
2. Pendidikan kesejahteraan keluarga untuk memberikan pengetahuan, keahlian dan sikap yang diperlukan guna memperbaiki kualitas kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan keluarga berencana;
3. Pendidikan kesejahteraan umum untuk memperkuat lembaga-lembaga dan proses kerja lokal dan nasional yang merupakan saluran penyampaian instruksi dan informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan dan proyek pembangunan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pendidikan ketenagakerjaan guna membantu para siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki lapangan kerja apapun bentuk dan jenisnya, yang sekiranya bisa dijadikan sandaran nafkah seumur hidup.

2.2.5. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara khusus Todaro (2000)⁴ menjelaskan bahwa motivasi utama atas permintaan terhadap pendidikan di negara-negara berkembang adalah untuk mempercepat perbaikan ekonomi yang dicita-citakan (melalui pengembangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan pendapatan lebih tinggi bagi segenap anggota masyarakat). Pandangan ini menitikberatkan perhatian pada tingkat pengeluaran pemerintah bagi bidang pendidikan, rasio penduduk usia sekolah yang bersekolah, tingkat buta huruf, tingkat putus sekolah, serta perbandingan antara tingkat pendapatan yang akan diperoleh melalui peningkatan pendidikan serta biaya-biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.

Di kebanyakan negara berkembang, pendidikan formal adalah "industri" dan konsumen terbesar anggaran pemerintah. Anggota masyarakat yang melek huruf dianggap lebih produktif dan lebih tanggap dalam menerima inovasi dan teknologi

⁴ Chapter 9 (Education and Development)

pertanian baru yang lebih dibandingkan petani yang buta huruf. Tamatan sekolah menengah pertama, dengan sedikit pengetahuan hitung-menghitung dan keahlian administratif sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan teknis pada instansi pemerintah dan swasta. Demikian pula lulusan perguruan tinggi dengan tingkat pelatihan tertentu sangat diperlukan dalam rangka mengelola dan mengembangkan organisasi-organisasi modern milik pemerintah serta asing baik nasional maupun asing.

Perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*) untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja terdidik dalam berbagai tingkatan dalam berbagai sektor pembangunan. Keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi kian disadari dan dimasa yang akan datang berbagai lowongan pekerjaan baik yang terisi maupun yang telah terisi hanya diisi tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan. Sehingga "doktrin" ini semakin menguatkan semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak ijazah atau sertifikat yang dimiliki maka peluang untuk mencari serta menempati lowongan pekerjaan dan berpenghasilan tinggi semakin semakin terbuka. Sebaliknya bagi golongan yang miskin dalam hal ini bagian masyarakat yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang cukup dengan perjuangan keras, maka pendidikan dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mengangkat anak-anak mereka dari kemiskinan.

Berkaitan dengan tingkat pengembalian (*rate of return*) dalam bidang pendidikan, Psacharopoulos (1989) mengemukakan beberapa isu penting, diantaranya:

- a. Jika pengeluaran pendidikan dianggap sebagai investasi maka hasil dari investasi tersebut sebagai bentuk modal manusia yang lebih konvensional bagi perekonomian.
- b. Perilaku tenaga kerja yang memperoleh pendidikan merupakan suatu bagian pengujian dari teori pasar tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan. Umumnya pasar tenaga kerja mengasumsikan bahwa tenaga kerja tidak *mobile* dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda diantara kelas pendapatan yang berbeda.
- c. Pembuatan kebijakan pendidikan penting diketahui ketika pengembalian (*return*) dari investasi pendidikan telah meningkat di atas *discount rate* ekspansi pendidikan yang diharapkan.
- d. Pola investasi pendidikan seyogyanya konsisten dengan pemerataan distribusi pendapatan.

2.2.6. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pengeluaran pemerintah turut berperan dan bahkan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Filmer dan Pritchett (1997) menyoroti divergensi antara dampak aktual dan dampak potensial *pengeluaran pemerintah* di bidang kesehatan di negara-negara sedang berkembang, menemukan bahwa 95 persen variasi tingkat kematian anak dapat dijelaskan oleh *non-health policy* yaitu faktor-faktor antara lain: pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, tingkat pendidikan wanita, dan faktor budaya. Sementara dampak *pengeluaran pemerintah* yang diukur menggunakan alokasi anggaran, sangat kecil dan secara statistik tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan Reinenikka dan Ablo (2003) terhadap dampak pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan di negara-negara Afrika menunjukkan bahwa (1) seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, yang diperkuat dengan semakin meningkatnya kontribusi nyata pemerintah terhadap gaji guru, telah meningkatkan *angka partisipasi sekolah dasar* sebesar 60 persen dalam kurun waktu 1991–1995; (2) alokasi anggaran pemerintah untuk biaya non gaji pada tingkat sekolah dasar secara riil menurun meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan meningkat; (3) Pengeluaran total untuk bahan-bahan pengajaran (*instructional materials*) hanya meningkat sebesar 20 persen selama periode yang diteliti.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah diakui oleh Ranis dan Stewart.⁵ Studi yang sejenis telah banyak dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil proses pendidikan. Terkait dengan beberapa alasan tersebut, pengelolaan anggaran yang buruk (*bad budget management*) seringkali dianggap sebagai alasan utama yang menghambat pemerintah di negara-negara sedang berkembang dalam mewujudkan pengeluaran pemerintah ke dalam jasa-jasa produktif (Bank Dunia: 1998).

Lebih lanjut, studi dampak pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dan *outcome* kedua sektor tersebut, dilakukan oleh Harbinson dan Hanushek (1992). Dari 12 studi yang dilakukan, ternyata hanya 6 studi diantaranya yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan, sedangkan 6 studi lainnya menunjukkan tidak ada bukti yang kuat. Tidak adanya bukti yang kuat dampak

⁵ Dapat dilihat pada <http://hdr.undp.or.id/docs/training/oxford/reading/Ranis%20and%20stewart.pdf>

pengeluaran pemerintah terhadap *outcome* sektor pendidikan dan kesehatan juga dikemukakan oleh Elley (1992), Hanushek (1995), Mingat dan Tan (1992, 1998).

Sejalan dengan hal tersebut Gupta, Verhoeven dan Tiongson (1999) menggunakan data *cross section* 50 negara sedang berkembang menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran kesehatan minimal dengan tingkat kematian balita. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Bidani dan Ravallion (1997) menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran kesehatan masyarakat dengan tingkat harapan hidup dan kematian balita. Demikian juga studi yang dilakukan oleh Filmer dan Pritchett (1999) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dari 3 persen menjadi 6 persen terhadap GDP meningkatkan tingkat kematian balita dari 9 persen menjadi 13 persen.

Rajkumar dan Swaroop (2002) dalam studinya menitikberatkan pada peranan *good governance* dan pengaruhnya terhadap hubungan antara pengeluaran pemerintah dan *outcome* sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan (1) pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan menurunkan tingkat kematian balita pada negara-negara dengan *good governance*. (2) sejalan dengan perbaikan-perbaikan menuju *good governance*, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dasar menjadi efektif dalam meningkatkan hasil proses pendidikan dasar. Hal ini membawa implementasi bahwa bagi negara-negara dengan *poor governance*, dimana *pengeluaran pemerintah* pada sektor pendidikan dan kesehatan relatif kecil, peningkatan pengeluaran pemerintah akan memberikan hasil yang lebih baik.

Keadaan yang sama juga dikuatkan oleh Ranis, Stewart, dan Ramirez (2000:208), bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk kaum perempuan. Dalam arti yang lebih luas, perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan akan menguatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Disebutkan bahwa semakin besar pengeluaran akan berdampak pada peningkatan angka melek huruf dewasa dan partisipasi sekolah wanita yang pada gilirannya akan memperbaiki pembangunan manusia itu sendiri.

2.2.7. Studi Tentang Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah diakui oleh Ranis dan Stewart. Studi sejenis telah banyak dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi, atau dampak

pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil proses pendidikan. Terkait dengan alasan tersebut, pengelolaan anggaran yang buruk (*bad budget management*) seringkali dianggap sebagai alasan utama yang menghambat pemerintah di negara sedang berkembang dalam mewujudkan pengeluaran pemerintah ke dalam jasa-jasa produktif.

Demikian pula dengan hal yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan mengambil data panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002. Berdasarkan studi tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam bidang pembangunan manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lanjouw, et al. (2001) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena investasi dibidang pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan terhadap kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kesehatan terhadap kinerja ekonomi penduduk pada kabupaten/kota di Jawa Timur;
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

3.2. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat dikembangkan menjadi sebuah langkah maju bagi penelitian yang menganalisis berbagai indikator non-moneter dengan lebih mengakomodasikan variabel yang lebih realistis.
2. Menyajikan komparasi indikator pembangunan yang lebih demokratis dalam sebuah proses pembangunan.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang lebih mengedapankan teknik analitik daripada deskriptif. Teknik analisis ini melibatkan intepretasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (penalaran kritis) terhadap sejumlah data yang telah terkompilasi dan terolah.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data kerat lintang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*). Data kerat lintang menunjukkan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota atau sejumlah 37 observasi ($i=37$). Tidak termasuk Kota Batu yang masih dianggap sebagai bagian dari Kabupaten Malang. Data runtut waktu yang digunakan sebagai dasar observasi yaitu tahun 1990-2004 atau sejumlah 9 observasi ($t=15$).

4.3. Metode Pengumpulan Data

4.3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Timur; Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprop) Jawa Timur; dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota. Unit analisis penelitian ini untuk seluruh variabel (independen dan dependen) adalah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sumber data untuk pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Indikator Sosial Ekonomi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (berbagai seri penerbitan). Data yang sama juga diperoleh dari Jawa Timur Dalam Angka (berbagai seri penerbitan).

Sumber Data pengeluaran pemerintah kabupaten/kota untuk bidang pendidikan dan kesehatan maupun diluar bidang tersebut diperoleh dari Realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sumber data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari laporan Indonesia Human Development Report yang dibuat bersama oleh BPS Pusat – Bappenas - UNDP. Data yang sama juga diperoleh dari Indikator Sosial Ekonomi Jawa Timur yang di buat oleh Bappeprop Jawa Timur. Demikian pula dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas Jawa Timur (berbagai seri penerbitan) diperoleh dari BPS Jawa Timur.

Sumber data angkatan kerja masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur diperoleh dari Jawa Timur Dalam Angka (berbagai seri penerbitan); Profil Angkatan Kerja di Jawa Timur dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur; serta Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur (berbagai seri penerbitan).

4.4. Definisi dan Pengukuran Peubah

Berdasarkan model yang telah dikemukakan pada persamaan (2.) maka di bawah ini akan dijelaskan rincian definisi peubah dari model berikut ini:

Variabel \dot{Y} menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi di Jawa Timur (variabel dependen) diperoleh dari pertumbuhan PDRB (produk domestik regional bruto) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 yang diukur dengan cara $(PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1} \times 100$.

Variabel LE (variabel independen) adalah indeks harapan hidup yang dijalani oleh seseorang semenjak kelahiran (umur 0 tahun). Angka LE ini lalu dirasiokan terhadap pertumbuhan tenaga kerja, ditulis $\left(\frac{LE}{L}\right)$.

Variabel Edu (variabel independen) adalah indeks gabungan antara rata-rata lama sekolah dan melek huruf orang dewasa penduduk dewasa. Demikian pula dengan indeks pendidikan ini juga dirasiokan dengan pertumbuhan tenaga kerja, ditulis $\left(\frac{Edu}{L}\right)$.

Variabel G_{HE} (variabel independen) adalah investasi pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan masing-masing kabupaten/kota yang diperoleh dari realisasi pengeluaran APBD kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mengingat APBD didasarkan pada tahun fiskal, maka untuk menjadikan tahun kalender yaitu dengan mengalikan $\frac{3}{4}$ (tahun fiskal per 1 April-31 Desember) dan $\frac{1}{4}$ (1 Januari-30 April), kecuali tahun 2001 hingga 2004 (tahun fiskal sama dengan tahun kalender). Investasi pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan ini

dikonstantakan atas tahun dasar 2000 (deflator PDRB) dan dirasiokan terhadap PDRB harga konstan tahun 2000 dikalikan pertumbuhan konsumsi pemerintah \dot{G} , ditulis $\left(\frac{G_{HE}}{Y}\right)\dot{G}$

Variabel \dot{L} (variabel independen) adalah pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diukur dengan cara $(L_t - L_{t-1}) / L_{t-1} \times 100$.

Variabel boneka D (*dummy variable*) untuk daerah berstatus kota = 1 dan kabupaten = 0.

Adapun detail data dapat tersebut dapat dilihat pada Lampiran (). Sedangkan sumber data secara rinci dapat dilihat pada daftar pustaka.

4.5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik analisis dan pengolahan data akan menggunakan regresi linier jamak/majemuk (*multiple linear regression*) yang diterapkan untuk data panel (gabungan antara data kerat lintang/*cross section* dan data runtut waktu/*time series*).

Berdasarkan penelitian yang pernah dikembangkan oleh Kim (1997) oleh peneliti dijadikan sebagai landasan dalam merancang model untuk melihat kinerja perekonomian di Jawa Timur yang dipengaruhi oleh input swasta maupun aktivitas pemerintah. Aktivitas pemerintah tampak dari pengeluaran untuk pengeluaran sektor publik lainnya diantaranya adalah investasi pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Selengkapnya model yang akan diestimasi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\dot{Y}_i = \beta_{0i} + \beta_1 \left(\frac{LE}{\dot{L}}\right)_{ii} + \gamma_1 \left(\frac{Edu}{\dot{L}}\right)_{ii} + \pi_{xi} \left[\left(\frac{G_{HE}}{Y}\right)\dot{G}\right]_{ii} + \phi_1 D_{ii} + \mu_{ii} \quad (4.1)$$

Dimana:

- \dot{Y} : pertumbuhan output regional (kinerja perekonomian);
- Y : produk domestik regional bruto kabupaten/kota;
- LE : indeks usia harapan hidup sejak kelahiran;
- Edu : Indeks pendidikan penduduk dewasa;
- G_{HE} : Investasi pembangunan manusia (pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan) oleh pemerintah lokal;

\dot{L}	: pertumbuhan tenaga kerja;
D	: variabel boneka, daerah kota (1), kabupaten (0)
μ	: galat acak (<i>error terms</i>);
β_0	: konstanta;
$\beta, \gamma, \pi, \theta$: koefisien regresi

4.5.1. Model Regresi Linier Jamak/ Majemuk dengan Data Panel

Adapun metode estimasi yang akan digunakan adalah *general least square* (GLS) dan untuk mengolah data akan menggunakan program EViews 5 [EViews, 2004]. Metode GLS adalah transformasi dari metode OLS (*ordinary least square*) dengan satu per akar varians (*standard error*) atau $1/\sigma$ [Gujarati, 2003]. Oleh karena itu metode GLS biasa disebut dengan *weighted least square* (WLS). Penggunaan metode estimasi GLS adalah untuk mengatasi gangguan heterokedastisitas yang cenderung terjadi pada jenis kerat lintang.

Beberapa asumsi dasar (asumsi klasik) yang harus dipenuhi [Pindyck dan Rubinfeld, 1998] yaitu:

- 1). Galat (*error terms*) bernilai harapan nol, $E(\mu) = 0$;
- 2). Galat memiliki varians konstan untuk semua observasi (*homoskedastisitas*);
- 3). Variabel independen adalah non-stokastik;
- 4). Tidak ada hubungan linier diantara variabel independen;
- 5). Tidak ada korelasi antara galat antar waktu sehingga galat pada waktu tertentu tidak berhubungan dengan galat pada waktu lainnya; dan
- 6). Antara galat dengan variabel independen tidak ada hubungan linier.

Asumsi-asumsi ini harus dipenuhi untuk mendapatkan estimasi parameter yang BLUE (*Best linear unbiased estimator*)

Hasil estimasi parameter model menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan independen, dimana hubungan tersebut diuji dengan statistik untuk melihat apakah suatu hipotesis (nol) bisa diterima/ditolak. Verifikasi yang dapat dilakukan adalah uji nilai t (uji parsial), uji nilai F (uji simultan), dan koefisien determinasi adjusted (*adjusted R-squared* atau R^2). Selain itu, model dievaluasi terhadap asumsi klasik yang difokuskan pada tiga pelanggaran asumsi klasik yaitu multikolinieritas, otokorelasi, dan heteroskedastisitas. Setelah dilakukan pengujian

adalah mengobati (solusi) atas gangguan penyakit tersebut [Pindyck dan Rubinfeld, 1998].

Penggunaan data panel adalah untuk menjawab persoalan bagaimana melakukan spesifikasi suatu model ekonometrika dalam mengestimasi parameter mampu menangkap perilaku individu berbeda selama kurun waktu tertentu. Keuntungan regresi dengan data panel dibanding dengan data runtut waktu atau kerat lintang yaitu terdapat observasi yang lebih banyak sehingga menaikkan derajat bebas dan mengurangi kolinieritas di antara variabel bebas yang pada akhirnya menghasilkan estimasi parameter yang efisien. Selain itu, keunggulan lain dengan data panel yaitu berpotensi mengandung gangguan tidak konsisten parameter regresi karena skala data berbeda yang berasal dari data kerat lintang, berpotensi mengalami gangguan otokorelasi antar pengamatan dari data runtut waktu, dan gangguan yang disebabkan gabungan keduanya.

4.5.2. Uji Distribusi Normal Galat (*Error Terms*)

Uji ini untuk melihat distribusi normal dari galat. Pengujian ini memakai statistik Jarque-Beraa dengan uji hipotesis [Pindyck dan Rubinfeld, 1998 dan Newbold, 1991]:

H_0 : galat berdistribusi normal

H_1 : galat tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas dari uji statistik Jarque-Bera lebih besar dari α pada tingkat 1%, 5%, 10%, maka hipotesis nol diterima (galat berdistribusi normal).

4.5.3. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi regresi linier jamak adalah tidak terdapat hubungan linier yang persis antar variabel bebas dalam model. Pelanggaran ini akan bermasalah jika tujuan meregresi adalah untuk menafsirkan koefisien regresi (*structural analysis*). Namun, jika tujuannya hanya untuk meramal, multikolinieritas tidak bermasalah. Untuk itu diperlukan deteksi multikolinieritas yaitu korelasi sederhana yang relatif tinggi (0,8) antara satu atau lebih pasang variabel independen. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 berarti masalah multikolinieritas tidak terlalu serius [Pindyck dan Rubinfeld, 1998].

Solusi multikolinieritas yaitu [Pindyck dan Rubinfeld, 1998 dan Gujarati, 2003]:

1. Membuang variabel independen yang mengalami kolinieritas;
2. Mengubah bentuk model yang sesuai;

3. Menambah data/ memilih sampel baru;
4. Menggabungkan data kerat lintang dan runtut waktu; dan
5. Mentransformasi variabel.

4.5.4. Uji Otokorelasi

Otokorelasi adalah korelasi antar galat dari observasi yang berbeda (antar waktu untuk data runtut waktu dan ruang untuk data kerat lintang). Pada umumnya galat dari observasi yang berbeda (biasanya berdekatan) saling berkorelasi dan hal ini sering terjadi untuk jenis data runtut waktu (time series) [Pindyck dan Rubinfeld, 1998 dan Gujarati, 2003]. Otokorelasi tidak mempengaruhi ketidakbiasan dan konsistensi estimator OLS, tetapi hal ini mempengaruhi efisiensi. Untuk itu diperlukan deteksi otokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson (DW), yaitu perhitungan uji statistik yang didasarkan pada residual-residual dari prosedur OLS, dimana statistik DW adalah:

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^T (\hat{\mu}_i - \hat{\mu}_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^T \hat{\mu}_i^2} \quad (4.2)$$

Selanjutnya solusi terhadap otokorelasi menggunakan metode AR (*autoregressive*) dan program EViews, 2004 menggunakan model nonlinier. Koefisien ρ dan β diestimasi secara simultan dengan metode *Marquardt non linear least squares* dari persamaan:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + (X_t - \rho X_{t-1})\beta + v_t \quad (4.3)$$

4.5.5. Uji Heteroskedastisitas

Gangguan heteroskedastisitas timbul akibat varians galat berubah. Walaupun gangguan ini lebih sering terjadi untuk jenis data kerat lintang, namun hal ini bisa terjadi untuk data runtut waktu. Konsekuensinya yaitu hasil dugaan dengan OLS masih tidak bias dan konsisten, tapi tidak efisien. Deteksi heteroskedastisitas menggunakan uji White [Pindyck dan Rubinfeld, 1998]. Uji ini tidak tergantung pada asumsi galat normal. Varians galat yang digunakan di sini adalah varians galat nominal.

Solusi terhadap gangguan heteroskedastisitas juga menggunakan metode estimasi *robust* atau biasa juga disebut dengan metode White [Green, 2000]. Pada prinsipnya metode estimasi yang digunakan adalah GLS (*generalized least square*).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004

Dalam bagian ini akan dipaparkan dinamikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan beberapa variabel yang mempengaruhi, selama kurun waktu 1990 – 2004. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro ekonomi yang cukup penting untuk mengetahui pembangunan suatu wilayah. Bahkan boleh dikatakan berhasil tidaknya program-program pembangunan dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonominya (Todaro, 2000: 136).

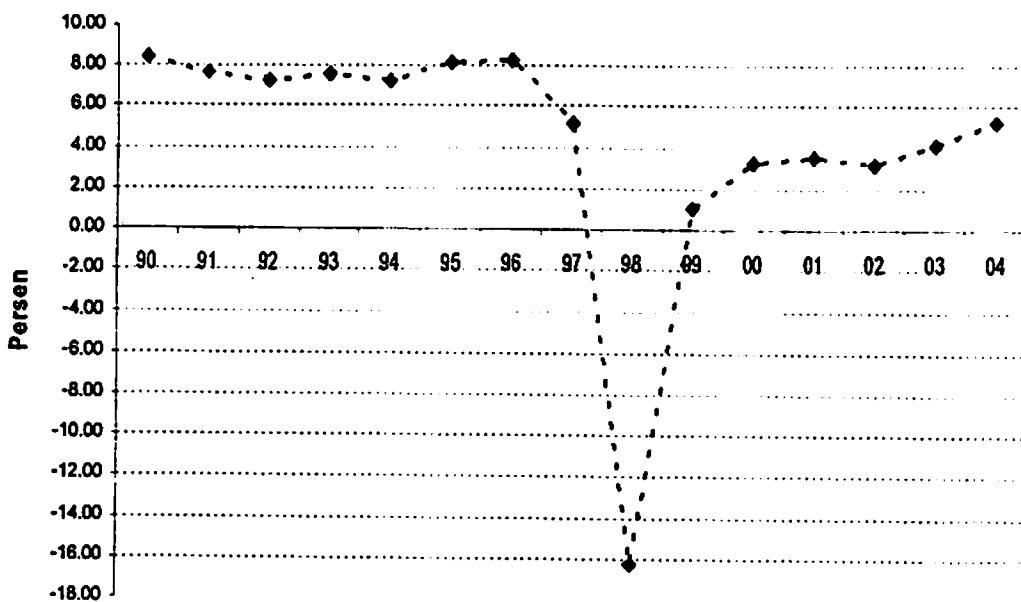
Secara umum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam periode tersebut dibagi dalam tiga periode. Periode *pertama*, merupakan periode sebelum terjadi krisis ekonomi, yakni kurun waktu dari tahun 1990 hingga 1997. Periode *kedua*, merupakan periode yakni kurun waktu dari tahun 1998-1999 pada saat perekonomian Jawa Timur sedang mengalami *masa krisis* seperti halnya yang dialami oleh perekonomian di Indonesia pada umumnya. Sedangkan periode *ketiga* yakni kurun waktu dari tahun 2000-2004 merupakan masa perekonomian sedang mengalami pemulihan (*recovery*) dari keterpurukan masa sebelumnya.

Pada periode *pertama* ditandai oleh pertumbuhan ekonomi [\dot{Y}] yang relatif stabil tinggi yakni rata-rata 7,47 persen, dengan angka pertumbuhan tertinggi mencapai 8,43 persen pada tahun 1990. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari unsur pertumbuhan tenaga kerja yang turut berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh rata-rata hampir sebesar 1,6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 2,68 persen yang pernah dicapai pada tahun 1996.

Sementara itu mutu modal manusia yang didasarkan pada indeks lama hidup [LE/i] berkembang rata-rata hanya sebesar 62,58 persen. Dalam periode ini indeks lama hidup terus-menerus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal tersebut berjalan seiring dengan indeks pendidikan [Edu] rata-rata tumbuh sebesar 61,21 persen. Demikian pula dalam periode ini indeks pendidikan juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sementara itu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia, yakni untuk bidang

kesehatan dan pendidikan [G_{HE}] hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen saja.

Pada periode *kedua* keadaan perekonomian Jawa Timur khususnya maupun Indonesia pada umumnya tengah mengalami *krisis ekonomi*. Di Jawa Timur kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator sosial ekonomi yang menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan periode sebelumnya. Diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi selama periode ini mencapai minus (16,29 persen) tahun 1998 dan 1,04 persen pada tahun 1999. Sehingga selama periode krisis tersebut praktis pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami keadaan yang lebih parah daripada perekonomian nasional pada umumnya (Lihat Gambar 5.2).

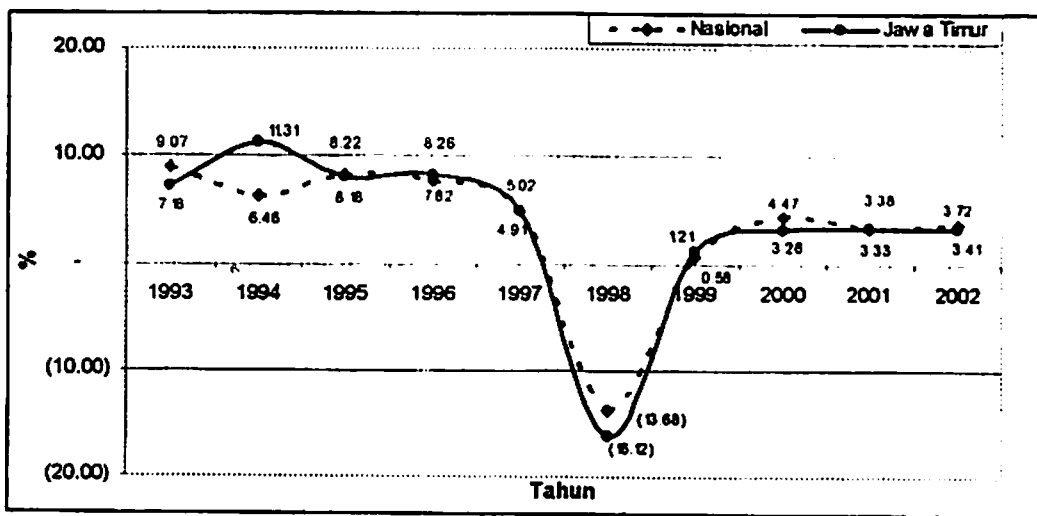


Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 1990-2004 (%)

Kedadaan ini tidak terlepas dari kondisi berbagai aktivitas baik sektor pemerintah maupun swasta yang mengalami kelesuan. Diantaranya adalah pertumbuhan tenaga kerja yang terlibat dalam perekonomian turut mengalami penurunan hingga minus (3,25 persen). Hal ini sangat mungkin karena saat itu banyak sektor swasta yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak sedikit tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau status mereka menjadi

pengangguran. Kendatipun demikian, indeks harapan hidup maupun indeks pendidikan penduduk di Jawa Timur terus mengalami peningkatan.

Pada saat yang sama pertumbuhan investasi modal manusia yang dilakukan oleh pemerintah selama periode tersebut juga mengalami penurunan hingga mencapai minus (6,97 persen) pada tahun 1998 dan minus (1,46 persen) pada tahun 1999. Dari sisi lainnya dapat dilihat bahwasannya indeks prestasi manusia (IPM) Jawa Timur pada tahun 1999 menduduki peringkat ke-22 dari 26 propinsi di Indonesia saat itu (BPS-Bappenas-UNDP, 2001:78).



Sumber: BPS Jatim, PBRD Jatim dan PDB Nasional, diolah.

Gambar 5.2.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 1993 – 2002

Periode *ketiga* keadaan perekonomian Jawa Timur pada umumnya tengah mengalami periode pemulihan (*recovery*). Keadaan ini ditandai dengan semakin membaiknya beberapa indikator sosial ekonomi dibandingkan periode sebelumnya, diantaranya adalah kecenderungan pertumbuhan ekonomi dari 3,28 persen pada tahun 2000 hingga 5,28 persen pada tahun 2004. Sementara itu peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur mengalami peningkatan dari 61,8 pada tahun 1999 (krisis ekonomi) menjadi 64,1 tahun 2002 (BPS-Bappenas-UNDP, 2004: 97). Bahkan pada tahun 2004 IPM Jawa Timur

telah meningkat lagi menjadi 64,49 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPS, Indikator Makro Sosial - Ekonomi Jawa Timur 2004: 279).

Pada periode tersebut dapat dikatakan bahwa hampir semua variabel penelitian telah meningkat dengan cukup pesat. Pertumbuhan tenaga kerja yang ada dalam perekonomian turut mengalami peningkatan dari 1,97 persen pada tahun 2000 hingga mencapai 3,12 persen pada tahun 2004.

Pertumbuhan investasi pembangunan manusia untuk kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah selama periode pemulihan juga mengalami peningkatan rata-rata hingga 7,51 persen. Demikian pula dengan proporsi investasi modal manusia APBD terhadap PDRB untuk tingkat kabupaten meningkat dari 0,48 pada tahun 1996 menjadi 0,55 pada tahun 2004. Sedangkan pada tingkat kota juga mengalami hal yang sama yakni dari 0,36 pada tahun 1996 menjadi 0,64 pada tahun 2004. Secara umum pada tingkat provinsi juga mengalami peningkatan dari 0,25 pada tahun 1996 menjadi 0,29 pada tahun 2004.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga membawa dampak positif terhadap penurunan indeks kemiskinan manusia (IKM).¹ Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak terhadap penurunan kemiskinan. Keadaan ini ditunjukkan dengan menurunnya IKM Jawa Timur dari 23,4 tahun 1999 menjadi 21,7 pada tahun 2002. Hal ini menjadi peringkat Jawa Timur beranjak dari urutan ke-8 pada tahun 1999 meningkat urutan ke-7 pada tahun 2002 (BPS-Bappenas-UNDP, 2004: 97:101).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan membawa pengaruh positif bagi membaiknya kualitas manusia atau meningkatnya IPM, seperti yang terjadi pada periode setelah krisis ekonomi (2000-2004). Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang kontraktif atau mengarah negatif cenderung sebaliknya yakni selain berdampak negatif pada kualitas manusia (periode 1998-1999) juga dapat menurunkan kualitas manusia yang tercermin dari semakin meningkatnya indeks kemiskinan manusia IKM. (Lihat Lampiran 3a-3c). Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia (tercermin dari IPM) suatu wilayah memerlukan

¹ IKM menurut UNDP menggunakan 3 dimensi, yakni *kehidupan* (lebih dari 30% penduduk yang dapat bertahan hingga usia 40 tahun; *pendidikan dasar* (penduduk dewasa yang buta huruf, terutama pendidikan perempuan); dan *standar hidup -ekonomi* (ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan dan berat badan balita).

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Bila IPM membaik hal ini akan mengikis tingkat kemiskinan masyarakat itu sendiri (tercermin dari IKM).

5.2. Pembangunan Manusia di Jawa Timur

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua sapek. Aspek *pertama* perbandingan antarwilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun sekaligus peringkat dari kemajuan pembangunan di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang *kedua* adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program pembangunan yang diimplementasikan dalam suatu periode tertentu.

Gambaran IPM di Jawa Timur akan dibagi menjadi dua periode waktu yakni periode 1996 - 1999 dan periode 1999 - 2002. Hal ini dilakukan mengingat adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di antara dua kurun waktu tersebut. Periode 1996-1999 ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 berdampak pada besaran IPM khususnya pada komponen daya beli. Berbeda halnya dengan periode 1996-1999, periode 1999-2002 ditandai dengan terjadinya pemulihan pada berbagai sendi ekonomi, meskipun pemulihan tersebut belum mampu mengembalikan kondisi perekonomian seperti kondisi sebelum krisis terjadi. Perbedaan tersebut secara signifikan berpengaruh pada karakteristik pembangunan manusia di Jawa Timur.

Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing-masing kabupaten/kota, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut, di antaranya pada tingkatan status pembangunan manusia dan tingkatan pertumbuhan IPM. Selanjutnya, dengan menggunakan IPM, *United Nations Development Program* (UNDP) membagi tingkatan status pembangunan manusia di kabupaten/ kota ke dalam empat golongan dengan kriteria seperti tampak pada Tabel 5.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal (IPM = 100) yang biasa disebut reduksi *shortfall* per tahun. Angka tersebut mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal. Dalam pengertian praktis reduksi *shortfall* dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan

berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall* di suatu wilayah maka semakin cepat kenaikan IPM yang dicapai dalam suatu periode.

Tabel 5.1
Kemajuan Pembangunan Wilayah Berdasarkan
Kriteria Indeks Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria IPM
Rendah	< 50
Menengah Bawah	$50 \leq \text{IPM} < 66$
Menengah Atas	$66 \leq \text{IPM} < 80$
Tinggi	$\text{IPM} > 80$

Sumber : BPS Provinsi Jatim

5.2.1. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 1996-1999

Semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, kondisi tersebut ternyata juga berdampak kepada pembangunan manusia di Jawa Timur. Keadaan ini tercermin pada besaran IPM yang mengalami penurunan dari tahun 1996 (65,5) dibandingkan IPM pada tahun 1999 (61,8). Dengan kata lain, akibat krisis tersebut telah terjadi kontraksi sebesar 5,65%. Kontraksi tersebut terjadi di seluruh kabupaten/ kota, di mana kontraksi tertinggi terjadi di Kabupaten Situbondo yaitu 7,43% sedangkan kontraksi terendah terjadi di Kabupaten Sampang sebesar 1,87%.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemunduran pada pembangunan manusia di Jawa Timur pada periode 1996-1999. Kondisi ini menunjukkan intensitas krisis ekonomi yang menimpa penduduk Jawa Timur. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur tetapi kondisi yang sama juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Secara umum status pembangunan manusia di kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 1996 dapat digolongkan pada tingkatan menengah, di mana sebanyak 17 kabupaten/ kota berada pada tingkatan menengah bawah dan 19 kabupaten/ kota berada pada tingkatan menengah tinggi sedangkan 1 (satu) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sampang, pembangunan manusianya masih digolongkan sebagai tingkatan rendah.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pada tahun 1999, terdapat 28 kabupaten/ kota di Jawa Timur yang berada pada tingkatan menengah bawah dan 8 kabupaten/ kota pada tingkatan menengah tinggi sedangkan Kabupaten Sampang tetap berada pada tingkatan rendah. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada periode 1996-1999 telah terjadi perubahan status pembangunan manusia dari menengah atas ke menengah bawah sebanyak 11 kabupaten/ kota yaitu kabupaten Pacitan, trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Magetan, serta Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan. Demikian banyaknya kabupaten/ kota yang mengalami perubahan status tersebut semakin memberi gambaran bahwa telah terjadi kemunduran yang berarti pada pembangunan manusia di Jawa Timur pada periode 1996-1999.

Hal menarik yang dapat dilihat di sini adalah kemunduran yang terjadi pada periode 1996-1999 semakin mendekatkan jarak pembangunan manusia menurut IPM antar kabupaten/ kota. Kecenderungan ini dapat dilihat dengan mengukur jarak antara IPM tertinggi dan IPM terendah serta dengan memperhatikan tingkat keragamannya. Pada tahun 1996, jarak tersebut adalah 25,7 dengan tingkat keragaman sebesar 5,93 sedangkan untuk tahun 1999 jaraknya sebesar 22,0 dengan tingkat keragaman sebesar 5,51. Dengan perkataan lain, IPM kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 1999 lebih merata dibandingkan IPM pada tahun 1996.

Tabel 5.2
Sebaran Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur
Menurut Status Pembangunan Manusia Tahun 1996 – 1999

Status Pembangunan Manusia 1996	Status Pembangunan Manusia Tahun 1999				Jumlah
	Rendah	Menengah Bawah	Menengah Tinggi	Tinggi	
Rendah	1	-	-	-	1
Menengah Bawah	-	17	-	-	17
Menengah Atas	-	11	8	-	19
Tinggi	-	-	-	-	-
Jumlah	1	28	8	-	37

Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur 1998 – 2002, BPS Prop. Jatim

Dari sisi peringkat, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 1996-1999. Perubahan peringkat yang terjadi berkisar antara kenaikan atau penurunan antara satu hingga dua peringkat. Perubahan peringkat yang sangat mencolok terjadi di Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya. Untuk Kabupaten Trenggalek, peringkat IPM pada tahun 1999 menurun 4 (empat) peringkat dibandingkan tahun 1996 yaitu dari peringkat 10 menjadi peringkat 14 sedangkan kenaikan peringkat terjadi di kota Surabaya yaitu dari peringkat 5 (lima) menjadi peringkat 1.

5.2.2. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 1999 - 2002

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengangkat kondisi perekonomian di Jawa Timur agar dapat pulih dari keterpurukan yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Langkah-langkah pemulihan telah dilakukan dan hasilnya pun mulai nampak. Kemajuan yang dicapai sebagai akibat dari dilaksanakannya berbagai pembangunan, khususnya dalam hal pembangunan manusia dapat dilihat melalui besaran IPM.

Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2002 dapat dikatakan sedikit meningkat dibandingkan tahun 1999. IPM Jawa Timur untuk tahun 2002 sebesar 62,64 dibandingkan 61,80 untuk tahun 1999 sehingga dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 1,36%. Sebenarnya, sebagian besar kabupaten/ kota cenderung telah pulih kondisi perekonomiannya yang dicerminkan oleh peningkatan pada pembangunan manusianya. Namun, peningkatan tersebut belum dapat diikuti oleh beberapa daerah lainya di mana besaran IPM-nya untuk tahun 2002 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 1999 yaitu Kabupaten Bondowoso, Kota Malang dan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan status pembangunan manusia, pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2002 mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan hal yang sama untuk tahun 1999. Keadaan ini dapat dilihat dari pergeseran status pembangunan manusia kabupaten/ kota 1999-2002. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi pergeseran status pembangunan manusia dari menengah bawah ke menengah atas, yang terjadi di sembilan kabupaten/ kota yaitu kabupaten Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Trenggalek, Blitar, Jombang, Kota Probolinggo serta Kota Pasuruan.

Gambaran menarik yang dapat dilihat bahwa daerah industri dan wilayah kota yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Gresik serta Kota Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, Madiun dan Surabaya di mana status pembangunan manusianya tetap berada pada kategori menengah atas. Akan tetapi jika dibandingkan, IPM tahun 2002 untuk Kota Malang mengalami kontraksi dibandingkan tahun 1999. Di lain pihak, Kabupaten Sampang tetap menjadi kabupaten di Jawa Timur yang paling rendah nilai IPM-nya. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sampang sebagai satu-satunya daerah yang berstatus rendah dalam hal pembangunan manusia. Dari dua kurun waktu, terindikasi bahwa perlu perhatian khusus untuk wilayah ini.

Seperti halnya pada penghitungan IPM sebelumnya, pada tahun 2002 ini belum ada kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan status tinggi pada pembangunan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status pembangunan manusia di kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 2002 dapat digolongkan pada tingkatan menengah. Gambaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Persebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
Menurut Status Pembangunan Manusia Tahun 1999 – 2002

Status Pembangunan Manusia Tahun 1999	Status Pembangunan Manusia Tahun 2002				Jumlah
	Rendah	Menengah Bawah	Menengah Tinggi	Tinggi	
Rendah	1	-	-	-	1
Menengah Bawah	-	19	9	-	28
Menengah Atas	-	-	8	-	8
Tinggi	-	-	-	-	-
Jumlah	1	19	17	-	37

Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Jatim 1998 – 2002, BPS Prop. Jatim

Dari sisi peringkat, banyak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 1999 – 2002. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan peringkat yang terjadi berkisar antara kenaikan atau penurunan hingga 6 (enam) peringkat, yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.

Pada tahun 2002 terdapat empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Blitar, Sampang, Banyuwangi, dan Pamekasan tidak mengalami perubahan peringkat

IPM. Prestasi yang sangat berarti ditunjukkan oleh Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini mengalami kenaikan sebanyak 6 peringkat yaitu dari peringkat 14 tahun 1999 menjadi 8 (delapan) pada tahun 2002. Kenaikan peringkat yang cukup berarti juga terjadi di Kabupaten Kediri, Kabupaten Bangkalan dan Kota Mojokerto. Bahkan, Kota Mojokerto berada pada peringkat pertama dalam hal pembangunan manusia di Jawa Timur.

5.3. Analisis Statistik Deskriptif

Secara statistik deskriptif, hasil penelitan ini terlihat dari beberapa variabel yang digunakan dalam model seperti terlihat pada Tabel 5.4. Dari hasil perhitungan rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi (\dot{Y}) kabupaten/kota di Jawa Timur berkisar 3,73 persen. Angka pertumbuhan tersebut bervariasi antara pertumbuhan tertinggi 14,44 persen dicapai oleh Kota Malang (1990). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan Jawa Timur pada periode tersebut yakni sebesar 8,43 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah dialami Kabupaten Tuban (1998) sebesar minus 23,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan Jawa Timur terendah pada periode tersebut [Lihat Lampiran 5.1].

Tabel 5.4. Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian Tahun 1990-2004

Keterangan	Y	LE	Edu	G _{HE}	D
Mean	3.734937	40.58791	38.74124	5.464123	0.133333
Median	4.360000	34.270000	33.270000	1.495794	0.000000
Maximum	14.440000	821.020000	826.700000	159.822400	1.000000
Minimum	-23.380000	-1484.510000	-1648.910000	-60.257150	0.000000
Std. Dev.	5.276031	93.271060	97.640400	18.264150	0.340241
Skewness	-2.374622	-6.543447	-8.201272	3.213914	2.157277
Kurtosis	10.345290	141.572800	172.022100	20.704820	5.653846
Jarque-Bera	1769.262	448016.6	666867.8	8204.231	593.3478
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Observations	555	555	555	555	555
Cross sections	37	37	37	37	37

Sumber: Hasil perhitungan EViews 4

Adapun dampak dari peningkatan rata-rata Indeks harapan hidup penduduk Jawa Timur (LE) terhadap perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur (PDRB) sebesar 40,59 persen. Hal yang sama juga terjadi pada indeks pendidikan, dimana semakin tinggi indeks tersebut atau lama sekolah masyarakat semakin bertambah, hal ini akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Rata-rata peranan indeks pendidikan terhadap kinerja perekonomian Jawa Timur adalah sebesar 38,74 persen. Dilain pihak rata-rata kemampuan investasi pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan (G_{HE}) memiliki peranan yang relative kecil yakni sebesar 5,46 persen.

Dilihat dari nilai tengah data dari posisi setelah diurutkan menunjukkan *median* sehingga mencerminkan ukuran dari pemusatan dari distribusi data. Bila nilai median dibandingkan dengan mean, maka dapat dikatakan semua variabel tersebut memiliki nilai yang berbeda. Adapun sebaran data dapat diukur berdasarkan nilai standar deviasi (SD). Dari nilai ini dapat dikatakan semakin kecil nilainya menjadikan nilai tengah sebagai ukuran pemusatan (ukuran kestabilan). Berdasarkan koefisien variasi, yakni SD dibagi rata-rata hitung ($SD/mean$), maka standar deviasi yang nilainya kecil hanya pada pertumbuhan ekonomi (\dot{Y}) yakni sekitar 141 persen.

Untuk melihat penyimpangan distribusi simetris dari distribusi normal dapat dilihat dari kemencengan (*skewness*) kurva. Dalam hal ini semakin mendekati nol nilai *skewness* berarti semakin simetris bentuk kurva tersebut (*bell shape*). Keadaan ini terjadi pada variabel pertumbuhan PDRB (\dot{Y}), dan pengeluaran pemerintah bidang pembangunan manusia (kesehatan dan pendidikan) yakni (G_{HR}) yang relatif terdistribusi secara simetris. Kecondongan kurva ke kanan ditunjukkan oleh tanda positif (+), sedangkan kecondongan kurva ke kiri ditunjukkan oleh tanda negatif (-).

Disamping itu kelancipan kurva dapat diuji dengan *kurtosis* (K). Untuk distribusi normal, nilai K samadengan 3. Jika lebih besar, bentuk kurva cenderung lancip atau kurus. Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan Tabel 5.1 tampak bahwa kurtosis variabel pertumbuhan ekonomi (\dot{Y}) yang relatif lebih mendekati (distribusi normal). Kedua uji tersebut, yakni *skewness* dan *kurtosis*, disebut uji normalitas *Bhowman-Shelton* (Newbold, 1991).

Disamping itu terdapat uji normalitas lainnya yakni Jarque-Bera (J-B) observasi yang mengikuti distribusi chi-square (χ^2) dengan dua derajat bebas

(Pyndick dan Rubinfeld, 1998). Nilai J-B observasi dibandingkan dengan nilai kritis χ^2 dengan $\alpha = 5\%$, diperoleh $\chi^2_{0,05;2} = 5,99$ (H_0 : distribusi normal). Dengan demikian tidak satupun variabel yang dapat menerima hipotesis nol (distribusi normal).

5.4. Estimasi Model dengan Data Panel

Dengan menggunakan data yang tersedia pada Lampiran 1 dan rancangan model pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada persamaan (4.4) pada Bab 4, maka berikut ini dilakukan proses pengujian ekonometrik untuk model regresi dengan menggunakan data panel dan diestimasi dengan metode OLS (*ordinary least square*) maupun GLS (*general least square*). Langkah berikutnya adalah memilih salah satu model terbaik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

5.4.1. Hasil Estimasi Model dengan Metode OLS

Hasil estimasi parameter model regresi dengan menggunakan OLS (*pooled estimation*) tanpa tertimbang (model *common* dengan opsi tidak tertimbang/ *no cross section weights*) menghasilkan estimasi parameter yang sama. [Lihat Tabel 5.2]. Estimasi koefisien parameter yang dihasilkan dari pengolahan tersebut secara ringkas parameter model tersebut signifikan semuanya untuk uji t (parsial). Disamping itu, tanda koefisien variabel bebas tidak ditemukan kesalahan. Artinya, hal ini sesuai dengan hipotesis parameter model yang terdapat pada Bab III bagian 3.2. Dilihat dari kinerja model masih relatif rendah yang diindikasikan oleh koefisien determinasi sebesar hampir 50,00 persen, namun hal ini signifikan dari uji F (simultan). Sedangkan koefisien determinasi *adjusted* (\bar{R}^2) yakni sebesar 49,20 persen.

Berdasarkan keterangan pada Lampiran 4 maka dihasilkan uji distribusi normal galat yang menunjukkan bahwa nilai galat model regresi tersebut tidak berdistribusi normal secara signifikan, baik uji *Jarque-Bera* (J-B) maupun uji normalitas *Bhowman-Shelton*, dimana skewness tidak mendekati nol dan kurtosis mendekati 3.

Tabel 5.5. Hasil Estimasi dengan OLS *Pooled* (*Common No Weighting*)Model Common Tidak Tertimbang dengan OLS data Data Panel

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 10/06/06 Time: 22:27				
Sample: 1990 2004				
Included observations: 15				
Number of cross-sections used: 37				
Total panel (balanced) observations: 555				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.218118	0.214385	24.33999	0.0000
LE?	-0.000454	0.017891	-0.025367	0.9798
EDU?	0.002139	0.017071	0.125291	0.9003
GHE?	-0.014253	0.009164	-1.555234	0.1205
D?	-11.02309	0.499478	-22.06923	0.0000
R-squared	0.495725	Mean dependent var	3.734937	
Adjusted R-squared	0.492057	S.D. dependent var	5.276031	
S.E. of regression	3.760233	Sum squared resid	7776.643	
F-statistic	135.1685	Durbin-Watson stat	2.326291	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Demikian pula dengan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa model OLS tidak terjadi gangguan serius bila dilihat dari korelasi masing-masing variabel bebas (dibawah 0,8 sebagai nilai kritis). Sementara itu hasil uji otokorelasi dengan korelasi serial *lagrange multiplier* (LM) diperoleh nilai probabilitas *obs*Rsquared* lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$ dan hasil uji Durbin-Watson (D-W) tampak model tersebut mengalami gangguan otokorelasi (Lampiran Tabel Statistik uji D-W) dengan nilai kritis antara 1,74715-2,25285. Selanjutnya untuk uji heterokedastisitas dengan menggunakan *White heteroscedasticity* dapat diketahui bahwa model OLS terjadi heteroskedastisitas, karena probabilitas *obs*Rsquare* lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$.

5.4.2. Hasil Estimasi Model *Common* dengan Metode GLS

Berdasarkan data Lampiran 1, selanjutnya dilakukan estimasi model *common* dengan opsi tertimbang/ *cross section weights* dalam program EViews 4 yang berarti menggunakan metode estimasi GLS. Hasil estimasi tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Secara umum parameter model awal untuk *common* GLS tersebut signifikan semuanya untuk uji t (parsial). Disamping itu tidak terdapat kesalahan

tanda koefisien variabel bebas (hipotesis parameter model pada Bab III bagian 3.2. Kinerja model awal tidak terlalu baik yang diindikasikan oleh koefisien determinasi sekitar 73,22 persen, namun signifikan dari uji F (simultan). Koefisien determinasi adjusted (\bar{R}^2) yakni sebesar 72,08 persen.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan solusi atas pelanggaran asumsi tersebut (Lihat Lampiran 5), maka kinerja model meningkat yang diukur oleh nilai koefisien determinasi yaitu menjadi sekitar Namun konstanta model tersebut masih belum signifikan. Selain itu model common GLS ini tidak dapat membedakan karakteristik unit kerat lintang (*cross section*) sehingga kurang sesuai dalam mendukung tujuan studi dan untuk analisis karakteristik unit kerat lintang.

Tabel 5.6. Hasil Estimasi dengan GLS Pooled (Common No Weighting)

Dependent Variable: Y?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 10/07/06 Time: 01:42
 Sample: 1990 2004
 Included observations: 15
 Number of cross-sections used: 37
 Total panel (balanced) observations: 555
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.621397	0.189707	24.36068	0.0000
LE?	0.014217	0.015987	0.889282	0.3742
EDU?	-0.009962	0.015567	-0.639941	0.5225
GHE?	-0.006464	0.007679	-0.841752	0.4003
D?	-9.839465	0.429196	-22.92536	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.521667	Mean dependent var	4.022850	
Adjusted R-squared	0.518189	S.D. dependent var	5.356516	
S.E. of regression	3.718099	Sum squared resid	7603.345	
F-statistic	149.9568	Durbin-Watson stat	2.336087	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.487092	Mean dependent var	3.734937	
Adjusted R-squared	0.483362	S.D. dependent var	5.276031	
S.E. of regression	3.792281	Sum squared resid	7909.769	
Durbin-Watson stat	2.228759			

5.4.3. Model *Fixed Effects* (FE) atau *Random Effects* (RE)

Telah diuraikan pada Bab III bahwa untuk menangkap efek individual atau unit kerat lintang diperlukan salah satu dari model ini yaitu menggunakan model *fixed effects* (FE) atau *random effects* (RE). Pemilihan model ini memerlukan uji Hausman agar diperoleh estimator yang terbaik. Untuk melihat hasil keseluruhan, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6, yakni hasil estimasi model FE dan RE serta proses uji Hausman.

Berdasarkan Lampiran 3 tampak bahwa hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang cocok untuk studi ini adalah model *fixed effects* (FE) secara signifikan. Sehingga hipotesis nol atau H_0 : terpilih RE (*random effects*) ditolak. Jadi, $H_{1,0}$: terpilih FE (*fixed effect*) diterima secara signifikan. Dalam pengujian Hausman untuk model RE digunakan hasil estimasi tertimbang / *cross section weight*. Sedangkan untuk model FE digunakan hasil estimasi tidak tertimbang. Perlu diketahui bahwa program Eviews 4 untuk model RE tidak bisa digunakan dengan estimasi tertimbang dan metode *outoregressive* jika mengalami gangguan otokorelasi.

5.5. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect* (EF) dan Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan rancangan model pertumbuhan ekonomi regional pada Bab III dan data pada Lampiran 1 dengan metode GLS diperoleh estimasi model awal (dengan Eviews 4) *fixed effects* (FE) seperti yang terdapat pada Lampiran 6. Model awal *fixed effects* - weighting (sebelum diuji terhadap pelanggaran asumsi klasik) ini sangat signifikan untuk semua parameter dalam uji t (parsial) dan tidak terjadi tanda dalam koefisien variabel bebas. Kinerja model relatif baik yakni hampir 70 persen serta signifikan dalam uji F(simultan) sedangkan koefisien determinasi *adjusted* (\bar{R}^2) yaitu sebesar 66,77 persen.

Dari Lampiran 6 terdapat hasil uji distribusi normal galat yang menunjukkan bahwa nilai galat model FE awal ini berdistribusi normal secara signifikan, baik uji *Jarque-Bera* (J-B) maupun uji normalitas *Bhowman-Shelton*. Dengan demikian galat FE awal ini memang berdistribusi normal secara signifikan. Hal yang sama juga untuk uji normalitas *Bhowman-Shelton*, dimana *skewness* mendekati nol dan *kurtosis* mendekati angka 3. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa hanya 15 daerah yang memenuhi untuk *kurtosis* dan terdapat 12 daerah yang tidak memenuhi untuk *skewness*.

Rincian hasil perhitungan pengujian atas gangguan multikolinieritas dapat dilihat pada Lampiran 3 sama seperti model common. Dengan batasan nilai kritis sebesar 0,8, maka model FE ini tidak terjadi gangguan serius dilihat dari korelasi masing-masing variabel bebas, hanya variabel tenaga kerja dan variabel boneka krisis di Kota Mojokerto yang berkorelasi -,8887.

Hasil uji otokorelasi dengan uji statistik Durbin-Watson (DW) terhadap model FE ini dapat disimpulkan bahwa model mengalami gangguan otokorelasi negatif, karena DW berada di daerah 4 - du DW 4 - DL ($2,253 < DW < 4,000$). Penggunaan metode tertimbang yaitu untuk menghindari dari gangguan heteroskedastisitas mengingat data yang digunakan dalam studi ini adalah jenis data panel. Dengan kata lain penggunaan GLS atau biasa disebut dengan *weighted least square* (WLS) merupakan solusi atas gangguan hetetoskedastisitas.

5.6. Solusi Terhadap Pelanggaran Asumsi Klasik

5.6.1. Solusi Heterokedastisitas

Walaupun telah diestimasi dengan menggunakan metode tertimbang, namun untuk estimasi model FE juga dicobakan *White heteroscedascity* agar varians menjadi konsisten dan efisien. Hasil estimasi setelah ditambahkan dengan metode White selain masih menggunakan *cross section weights* menunjukkan perubahan pada nilai statistik t (uji t), yakni terjadi peningkatan hanya untuk koefisien *dummy* krisis sedikit menurun, tapi masih sangat signifikan. Nilai parameter, kinerja model, statistic F, dan DW tidak terjadi perubahan dengan metode *White*.

5.6.2. Solusi Otokorelasi

Solusi atas gangguan otokorelasi yaitu dengan metode AR order satu, termasuk tetap memakai metode tertimbang dan *White* sehingga nilai statistik DW menurun dibanding dengan model FE awal yaitu dari DW = 2,5438 menjadi DW = 2.2545 dan nilai parameter serta tingkat signifikannya membaik. Lebih jauh, DW berada di daerah penerimaan H_0 , artinya tak ada otokorelasi. Jadi, nilai observasi DW = 2.2545 berada dalam interval $d_u \leq DW \leq 4 - d_u$ ($1,745 < DW < 2,255$) atau berada di daerah penerimaan H_0 (tidak ada otokorelasi) dengan $\alpha = 1\%$; $k = 6$; dan $n = 407 \approx 400$.

5.7. Analisis Model *Fixed Effects* Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Pada bagian ini akan dianalisis secara struktural hasil akhir estimasi model FE yang telah disempurnakan dari pelanggaran asumsi klasik.

5.7.1. Intepretasi Model Analisis

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang makna dari hasil estimasi model FE, yakni:

- a. Pengaruh investasi swasta (G_{HE}) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y^2) mempunyai koefisien positif (hubungan searah) yang signifikan. Artinya, jika terjadi kenaikan investasi pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan meningkat sebesar 0,29 persen, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau konstan.
- b. Berikutnya, untuk kesehatan (LE) mempunyai pengaruh positif secara signifikan, sehingga jika terjadi kenaikan tenaga kerja sebesar 1 persen, keadaan ini akan menyebabkan perekonomian tumbuh sekitar 0,71 persen, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau konstan.
- c. Berikutnya, bila terjadi perubahan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan pembangunan manusia yakni untuk sektor kesehatan dan pendidikan, maka hal ini akan menimbulkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dalam hal ini setiap kenaikan pengeluaran untuk pembangunan manusia sebesar 1 persen, akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau konstan.
- d. Untuk variabel pendidikan (Edu) berdampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun bila konsumsi pemerintah daerah berubah sebesar 1 persen maka hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 0,0014 persen, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau konstan.

- e. Sementara itu pengaruh variabel boneka (*dummy*) yang menangkap perubahan eksternal makro ekonomi, dalam hal ini adanya krisis ekonomi yang berlangsung tahun 1998 dan 1999.
- f. Variabel tersebut berpengaruh negatif (berlawanan arah) secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi bila terdapat perubahan eksternal makro yang besar keadaan ini dapat berdampak terhadap penurunan kegiatan perekonomian daerah sebesar 6,83 persen.

Untuk mengetahui peranan maupun untuk membandingkan pengaruh yang terbesar dari setiap koefisien terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat menggunakan koefisien metrics seperti yang telah diperlihatkan di atas. Oleh karenanya digunakan koefisien baku (*standardized coefficients*). Pada prinsipnya koefisien tersebut merupakan normalisasi (*normalized*) dari koefisien model terhadap standar deviasi dengan tujuan untuk menghindarkan perbedaan ukuran variabel dan varian yang berbeda-pula.

Dengan demikian koefisien baku masing-masing variabel dapat diperbandingkan secara langsung. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa kondisi eksternal yakni keadaan krisis ekonomi (*D*) adalah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan di Jawa Timur, kemudian diikuti oleh variabel indeks harapan hidup (*LE*) dan berikutnya variabel indeks pendidikan (*Edu*). Demikian pula dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia (*SDM*) yang terdiri dari pengeluaran bidang kesehatan dan pendidikan (*G_{HE}*) turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Bila diperhatikan maka faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur dapat dikelompokkan antara pengaruh sektor swasta, sektor pemerintah daerah, serta pengaruh lainnya. Dapat dicontohkan bahwa dari rata-rata sampel indeks pendidikan (*Edu*) sebesar 20,30 persen, maka peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sebesar $(20,30\% \times 0,2911)^2$ yakni sekitar 5,91 persen yang berperan dalam menumbuhkan perekonomian. Sementara itu pengaruh sumbangan kesehatan (*LE*) yakni sebesar $1,34\% \times 0,7071$ yakni sekitar 0,95 persen terhadap perekonomian.

² [rata-rata sample dikalikan dengan koefisien model]

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengkaji keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Aspek *pertama*, perbandingan antarwilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun sekaligus peringkat dari kemajuan pembangunan di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang *kedua*, adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program pembangunan yang diimplementasikan dalam suatu periode tertentu.
2. Pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi aspek ekonomi saja, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi dan satu dengan lainnya saling terkait.
3. Krisis ekonomi tahun 1997 berdampak pada pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini tercermin pada besaran IPM yang mengalami penurunan dari tahun 1996 (65,5) dibandingkan IPM pada tahun 1999 (61,8) atau telah terjadi kontraksi sebesar 5,65%. Kontraksi tersebut terjadi di seluruh kabupaten/ kota, di mana kontraksi tertinggi terjadi di Kabupaten Situbondo yaitu 7,43% sedangkan kontraksi terendah terjadi di Kabupaten Sampang sebesar 1,87%.
4. Telah terjadi kemunduran pada pembangunan manusia di Jawa Timur pada periode 1996-1999. Kondisi ini menunjukkan intensitas krisis ekonomi yang menimpa penduduk Jawa Timur. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur tetapi kondisi yang sama juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.
5. IPM Jawa Timur tahun 2002 sedikit meningkat dibandingkan tahun 1999. IPM Jawa Timur untuk tahun 2002 sebesar 62,64 dibandingkan 61,80 untuk tahun 1999 terjadi peningkatan sebesar 1,36%. Namun, peningkatan tersebut belum dapat diikuti oleh beberapa daerah lainnya di mana besaran IPM-nya untuk tahun 2002 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 1999 yaitu Kabupaten Bondowoso, Kota Malang dan Kabupaten Pacitan.

6. Pembangunan manusia pada tahun 2002 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi pergeseran status pembangunan manusia dari menengah bawah ke menengah atas, yang terjadi di sembilan kabupaten/ kota yaitu kabupaten Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Trenggalek, Blitar, Jombang, Kota Probolinggo serta Kota Pasuruan.
7. Gambaran menarik wilayah kota yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Gresik serta Kota Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, Madiun dan Surabaya di mana status pembangunan manusianya tetap berada pada kategori menengah atas. Jika dibandingkan, IPM tahun 2002 Kota Malang mengalami kontraksi dibandingkan tahun 1999. Kabupaten Sampang tetap menjadi kabupaten yang paling rendah nilai IPM-nya. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sampang sebagai satu-satunya daerah yang berstatus rendah dalam hal pembangunan manusia.
8. Hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan angka harapan hidup cukup berkaitan erat. Pada umumnya bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik maka angka harapan hidup juga akan membaik atau semakin tinggi, dan sebaliknya. Dengan kata lain bila semakin tinggi angka harapan hidup maka hal ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin maju.
9. Model yang sesuai dengan studi ini adalah model *fixed effect*, setelah melalui tahapan uji. Seluruh variabel penelitian yakni indeks harapan hidup (LE), indeks pendidikan (Edu), pengeluaran pemerintah lokal untuk bidang SDM kesehatan dan pendidikan (G_{HE}), serta variabel boneka (D) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

6.2.2 Saran

1. Strategi pembangunan yang semata-mata menekankan pada aspek ekonomi hendaknya perlu diimbangi dengan aspek non-ekonomi lainnya yakni aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini terbukti bahwa aspek kesehatan dan pendidikan yang lebih menentukan pembangunan suatu wilayah.
2. Alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan dan kesehatan hendaknya lebih mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatno, Bambang E. dan Tohari, Ahmad. 2005. Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur dari Pengaruh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Eksternal, Fakultas Ekonomi. Tidak dipublikasikan. Surabaya.
- Anand, S. and Ravallion, M. 1993. Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Income and Public Service, *The Journal of Economic Perspectives*, 7 (1): 133-150.
- Andreosso, Bernadette and O'Callaghan. 2002, Human Capital Accumulation and Economic Growth in Asia, *National Europe Centre Paper 30*.
- Aschauer, D. 1989, Is Government Spending Productive?, *Journal of Monetary Economics* 23: 177 – 200.
- Barro, R.J. 1990, Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, *Journal of Political Economy* 98: S103 – S125.
- Barro, R.J. and Martin, X.S.I. 1995. *Economic Growth, International Edition*, McGraw-Hill, New York.
- Bastor, Nancy. 1972. *Development Indicator: An Introduction*, dalam Nancy Bastor (ed.), *Measuring Development: The Role and Adequacy of Development Indicator* (London: Cass, 1972)
- Djadjanegara, SO., dan Ananta A. 1986. *Mutu Modal Manusia: Suatu Pemikiran Mengenai Kualitas Penduduk*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Easterly, W. and Rebelo, S. 1993. Fiscal Policy and Economic Growth, *Journal of Monetary Economics* 32: (3): 417 – 458.
- EViews. 2002. *EViews 4.1 User's Guide-Update*. Quantitative Micro Software, California.
- Filmer D. And Pritchett L. 1997, *Child Mortality and Public Spending on Health: How Much Does Money Matter?*, World Bank.
- . 1999, "The Impact of Public Spending on Health: Does Money Matter?", *Social Science and Medicine* 49(1): 1309 – 1323.
- Jahan, S. 2000. *Measurements of Human Development: Seven Questions*, Oxford University, The First Human Development Course.
- Lee, Jong-Wha. 2005. "Economic Growth and Human Development in The republic of Korea, 1945-1992. Occasional Paper No.24.

www.hdr.undp.org/docs/publications/occasional_papers/oc24aa.

Pebruari, 6, 2006.

- Mankiw, N. Gregory, 2000, *Teori Ekonomi Makro, Edisi Keempat*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Offer, A. 2000. *Economic Welfare Measurements and Human Well-Being*. Discussion Paper in Economic and Social History No.34. Revised Version, University of Oxford, March, 2000.
- Pindyck, Robert S. dan Rubinfeld, Daniel L. 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts, Fourth Edition*. McGraw-Hill, New York.
- Rajkumar A.S. and Vinaya Swaroop. 2002, *Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?*, JEL: E62;O23, World Bank.
- Ramirez, A., Raniz, G., and Stewart, F. 1998. *Economic Growth and Human Capital*, *World Development* 28 (2): 197-219
- Reinikka R. and Ablo, E. 1998. "Do Budget Really Matter? Evidence from public spending on education and health in Uganda". Policy Research Paper 1926,
- Schultz, Theodore W., 1961. *Investment in Human Capital*. *American Economic Review*, 36 (3): 12
- Solihin, Achmad. 2002. *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tidak Dipublikasikan.
- Todaro, MP. 2000. *Economic Development*. Seventh Edition. Addition Wesley. New York.
- Todaro, MP. dan Smith, SC. 2003. *Economic Development*. Eighth Edition. Pearson Education Limited, United Kingdom. Haris Munandar dan Puji A.L. (Penterjemah). 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New concensus: Democracy and Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS - Statistics Indonesia, Bappenas and UNDP Indonesia.
- UNDP, BPS, and Bappenas. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS - Statistics Indonesia, Bappenas and UNDP Indonesia.

Data dan Variabel untuk Estimasi Model

No.	Kab/ Kota	Kode Variabel	Variabel <i>Dummy</i> untuk Perubahan Eksternal (Krisis Ekonomi Th 1998-1999) – D													
			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pacitan	D_PCT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	Ponorogo	D_PNG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Trenggalek	D_TGL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	Tulungagung	D_TLG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	Blitar	D_BLT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	Kediri	D_KDR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	Malang	D_MLG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	Lumajang	D_LMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9	Jember	D_JBR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	Banyuwangi	D_BYW	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	Bondowoso	D_BDW	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	Situbondo	D_STB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	Probolinggo	D_PBL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	Pasuruan	D_PSR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
15	Sidoarjo	D_SDJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	Mojokerto	D_MJK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	Jombang	D_JBG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	Nganjuk	D_NGJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19	Medan	D_MDN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	Magetan	D_MGT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	Ngawi	D_NGW	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22	Bojonegoro	D_BJN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
23	Tuban	D_TBN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
24	Lamongan	D_LMG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	Gresik	D_GRS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	Bangkalan	D_BKL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
27	Sampang	D_SPG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
28	Pamekasan	D_PMK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	Sumenep	D_SMN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
30	Kediri*	D_KDRK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31	Blitar*	D_BLTk	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
32	Malang*	D_MLGK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33	Probolinggo*	D_PBLK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
34	Pasuruan*	D_PSRK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
35	Mojokerto*	D_MJKK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
36	Medan*	D_MDNK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
37	Surabaya*	D_SBYK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Uji Normal - Residual Test Model Common - Tertimbang (GL5)

	RESID_PCT	RESID_PNG	RESID_TGL	RESID_TLG	RESID_BLT	RESID_KDR	RESID_MLG	RESID_LMJ
Mean	-1.086875	-0.012885	-0.46736	0.865062	-0.20931	-0.723429	0.421401	-0.031965
Median	-1.941576	-1.214376	-0.834672	0.940581	-0.877402	-1.262662	-0.313406	-0.593105
Maximum	6.91865	7.249795	5.612608	7.028196	7.435898	7.550433	5.399037	6.966287
Minimum	-3.894843	-2.584892	-3.088155	-10.5145	-4.894133	-8.557103	-5.991473	-9.410115
Std. Dev.	2.630341	2.632808	2.111713	3.698412	3.047703	3.415813	2.887394	3.727016
Skewness	1.937484	1.558883	1.530835	-1.745996	1.029757	0.201095	-0.124373	-0.560421
Kurtosis	6.801242	4.790562	5.687237	7.501647	3.952164	4.839869	3.088472	4.258479
Jarque-Bera	18.41552	8.077549	10.37192	20.28677	3.217633	2.216797	0.043563	1.775035
Probability	0.0001	0.017619	0.005595	0.000039	0.200124	0.330087	0.978454	0.411676
Observations	15	15	15	15	15	15	15	15

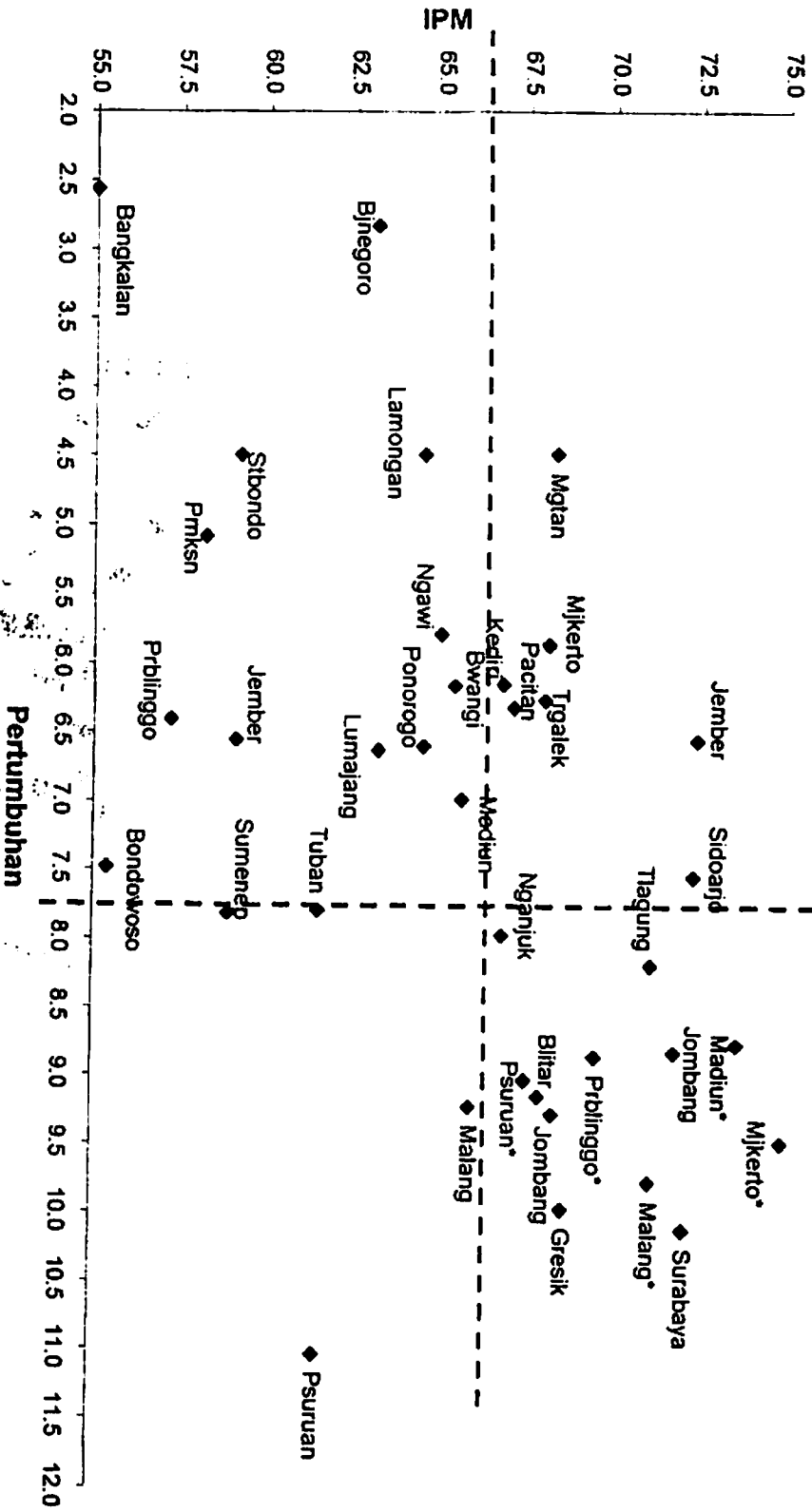
	RESID_JBR	RESID_BYW	RESID_BDW	RESID_STB	RESID_PBL	RESID_PSR	RESID_SDJ	RESID_MJK
Mean	-0.160468	0.197974	-0.363719	-0.241888	0.535869	1.234847	2.051021	-0.034825
Median	0.07848	-0.073529	-0.928268	-0.529037	0.091099	0.300565	1.482543	0.2148
Maximum	3.528576	5.536069	6.080824	6.26551	5.664299	11.1986	9.383803	7.995139
Minimum	-6.147967	-7.575877	-3.411214	-4.797723	-7.4229	-8.328149	-15.20355	-9.633021
Std. Dev.	2.421739	2.964135	2.332575	2.560753	3.198301	4.360564	5.957417	3.61457
Skewness	-1.00209	-0.860121	1.49073	0.837813	-0.700906	0.214565	-1.47141	-0.559552
Kurtosis	3.808308	4.619567	5.023493	4.236405	3.901897	4.064633	5.793016	5.725932
Jarque-Bera	2.918813	3.488894	8.114766	2.710261	1.73656	0.823497	10.28821	5.426936
Probability	0.232374	0.174742	0.017294	0.257914	0.419673	0.662491	0.005834	0.066306
Observations	15	15	15	15	15	15	15	15

	RESID_JBG	RESID_NGJ	RESID_MDN	RESID_MGT	RESID_NGW	RESID_BJN	RESID_TBN	RESID_LMG
Mean	0.003652	-0.189566	-0.805831	-0.782849	-0.543883	-0.582479	-0.202884	-0.376424
Median	-0.324361	-0.348023	-1.050127	-0.660287	-0.993861	-1.381051	-0.256179	-1.234066
Maximum	8.286465	6.304783	6.03038	5.77212	6.833576	6.634128	16.63722	7.117679
Minimum	-7.754949	-8.046755	-7.871765	-6.433673	-4.92206	-6.484034	-18.16333	-4.067467
Std. Dev.	3.512605	3.156841	2.915543	2.597158	2.921983	2.844656	6.796235	2.61309
Skewness	0.365307	-0.369138	-0.056309	0.423889	1.082973	0.576467	-0.244439	1.524678
Kurtosis	4.489173	4.511554	5.097944	4.924162	3.947181	4.707891	6.63158	5.628403
Jarque-Bera	1.719647	1.768855	2.758784	2.763204	3.492797	2.853842	8.392111	10.12942
Probability	0.423237	0.412992	0.251732	0.251176	0.174401	0.265293	0.015055	0.006316
Observations	15	15	15	15	15	15	15	15

	RESID_GRS	RESID_BKL	RESID_SPG	RESID_PMK	RESID_SMN	RESID_KORK	RESID_BLTK	RESID_MLGK
Mean	2.296004	-0.551783	-0.639286	-0.418824	-0.839308	2.155734	0.959927	1.521809
Median	3.738222	-0.982503	-1.303509	-0.535696	0.871377	2.37336	1.186244	2.363342
Maximum	9.198686	5.177202	7.802103	6.34101	3.567923	8.154629	6.248875	9.699854
Minimum	-13.60308	-3.40012	-3.624147	-6.061326	-13.89881	-7.380235	-11.04625	-16.47072
Std. Dev.	5.183718	2.226325	2.793233	2.843816	4.451218	4.702911	3.744827	6.105458
Skewness	-1.809783	1.1078	1.836823	0.596834	-1.710678	-0.586168	-2.177578	-1.847176
Kurtosis	7.138854	3.942072	6.638409	4.125866	5.924289	2.369573	8.441325	6.135625
Jarque-Bera	18.89461	3.622739	18.70856	1.682762	12.66072	1.107362	30.35962	12.92806
Probability	0.000079	0.16343	0.000235	0.431115	0.001781	0.574824	0	0.001558
Observations	15	15	15	15	15	15	15	15

	RESID_PBLK	RESID_PSRK	RESID_MJKK	RESID_MDNK	RESID_SBYK
Mean	0.913851	1.60867	1.754234	1.232484	1.480849
Median	1.511817	1.492913	1.663705	2.438666	3.876189
Maximum	6.768895	7.15852	7.378762	5.33136	6.113855
Minimum	-13.19529	-6.418912	-7.36419	-11.81202	-17.1424
Std. Dev.	4.821928	3.234169	3.540753	4.284097	5.805799
Skewness	-1.634206	-0.800993	-0.818865	-1.973035	-2.313557
Kurtosis	5.935907	3.914359	4.169574	6.962247	8.212052
Jarque-Bera	12.0638	1.425515	2.531291	19.54429	30.35979
Probability	0.002401	0.49029	0.282057	0.000057	0
Observations	15	15	15	15	15

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1996



Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan IKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004

